

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN RIMBO BUJANG DAN  
KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO PROVINSI  
JAMBI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**OLEH :  
WIDIA ASTUTI  
NIM : 105190281**

**Pembimbing:  
Wenny Dastina, S.Sos., M.Si  
H. Muhammad Mustajab, Lc., M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1445 H/2023 M**

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi saah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 26 Juni 2023



Widia Astuti  
NIM: 105190281

### PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "ANALISIS PERBANDINGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN RIMBO BUJANG DAN KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 10 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Satu (S.1) dalam Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Jambi, September 2023

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Saiful S.Ag., M.H  
NIP. 19720402 200003 1 005

#### Panitia Ujian:

- |                      |   |         |
|----------------------|---|---------|
| 1. Ketua Sidang      | : <u>Svamsu Hadi J, M.HI</u><br>NIP. 197407011999031004               | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Zarkani, M.M</u><br>NIP. 197603262002121001                      | (.....) |
| 3. Pembimbing I      | : <u>Wenny Dastina, S.Sos., M.Si</u><br>NIP. 197801092005012006       | (.....) |
| 4. Pembimbing II     | : <u>Muhammad Mustajab, Lc., M.H</u><br>NIP. 199109142020121011       | (.....) |
| 5. Penguji I         | : <u>Drs. A. Faruk, MA</u><br>NIP. 196311151992031002                 | (.....) |
| 6. Penguji II        | : <u>Devrian Ali Putra, S.S.I., M.A.HK</u><br>NIP. 198809112018011001 | (.....) |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## MOTTO

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ  
الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bila dikatakan kepada mereka: “janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi”. Mereka menjawab: “sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. (QS. Al- Baqarah: 11-12).



## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk Ayahanda Nurmadi Siswanto dan Ibunda Soleha yang sangat saya sayangi dan saya cintai yang telah mengasuh serta membesarkan saya hingga saya sampai ke bangku kuliah tanpa mengenal lelah. Sebesar apapun sesuatu yang dapat saya berikan kepadanya tidak akan pernah bisa membalas pengorbanan dan kebaikannya. Kini *study* saya telah selesai berkat doa dan restu dari kalian malaikatku, besar harapan anakmu ini ingin menjadi kebanggaan kalian, tapi itu semua tidak akan terwujud tanpa doa dan restu dari kalian dan pada kesempatan ini anakmu ingin meminta maaf apabila selama ini telah menyusahkan kalian, walau kalian tidak pernah mengeluh dan tidak pernah mengatakan tidak terhadap apa yang anakmu ini perlukan. Dan kini hanya ucapan terima kasih lah yang bisa anakmu ucapkan dan ananda berdoa semoga Allah SWT. senantiasa melindungi kalian, aamiin.

Kepada kakak yang sangat saya sayangi Uvi Otovia Ulandari dan adik yang saya cintai Tri Ikif Purwanto, serta keluarga tercinta, datuk Nurdin (Alm), nyai Almas (Alm), datuk M. Syukur, nyai Siti Nurgaya, paman Eko Aldi yang telah memberikan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

## ABSTRAK

**Nama : Widia Astuti**

**Nim : 105190281**

**Judul : Analisis Perbandingan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi**

**Absrak:** Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu, bagaimana perbandingan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu dan bagaimana kebijakan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kecamatan Rimbo Bujang lebih maju dibandingkan Kecamatan Tebo Ulu sebab faktor mobilitas Kecamatan Rimbo Bujang yang tinggi, banyaknya masyarakat pendatang di Kecamatan Rimbo Bujang, serta rendahnya tingkat pemeliharaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tebo Ulu. (2) Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang lebih maju dan memiliki fasilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik karena jumlah mobilitas dan jumlah penduduk yang tinggi dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tebo Ulu yang memiliki fasilitas sosial dan ekonomi yang kurang lengkap karena jumlah penduduk yang kecil. (3) Pencapaian target program pembangunan infrastruktur di kedua kecamatan tersebut pada umumnya sudah mencapai target yang ditentukan dan direncanakan namun dalam pemeliharaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tebo Ulu masih terbilang rendah karena jumlah penduduk di Kecamatan Tebo Ulu yang jauh lebih sedikit.

**Kata Kunci : Analisis, perbandingan, Pembangunan Infrastruktur**

## ABSTRACT

**Name : Widia Astuti**

**Nim : 105190281**

**Title : Comparative Analysis of Infrastructure Development in Rimbo Bujang District and Tebo Ulu District, Tebo District, Jambi Province**

**Abstract:** This thesis aims to find out how infrastructure development is in Rimbo Bujang District and Tebo Ulu District, how infrastructure compares in Rimbo Bujang District and Tebo Ulu District and what the infrastructure development policies are in Rimbo Bujang District and Tebo Ulu District. This study uses qualitative research with a descriptive approach. The data collection methods used were observation, interviews and documentation. The research results show (1) Rimbo Bujang District is more advanced than Tebo Ulu District due to the high mobility factor of Rimbo Bujang District, the large number of migrant people in Rimbo Bujang District, and the low level of maintenance of infrastructure development in Tebo Ulu District. (2) Infrastructure development in Rimbo Bujang District is more advanced and has better social and economic facilities because of the high mobility and population compared to infrastructure development in Tebo Ulu District which has less complete social and economic facilities due to the small population. . (3) The achievement of infrastructure development program targets in the two sub-districts has generally reached the targets determined and planned, however maintenance of infrastructure development in Tebo Ulu Sub-district is still relatively low because the population in Tebo Ulu Sub-district is much smaller.

**Keywords: Analysis, comparison, Infrastructure Development**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan suatu penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi ” merupakan suatu kajian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pembangunan infastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis dapatkan baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.




Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph. D sebagai Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA., M.IR., Ph.D, Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Bapak Dr. Ishaq, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum Sebagai Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi.
5. Ibu Wenny Dastina, S.Sos., M.Si sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi, serta sebagai Pembimbing I.
6. Bapak H.Muhammad Mustajab, Lc., M.H sebagai Pembimbing II.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
8. Orang Tua dan Keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi dan dukungan tiada hentinya hingga menjadi kekuatan pendorong bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, penulis sadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, 26 Juni 2023

Penulis,

  
Widia Astuti  
NIM. 105190281

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA</b>	
A. Pengertian Pembangunan Infrastruktur.....	24
B. Landasan Teori.....	26
C. Jenis Pembangunan Infrastruktur.....	27
D. Komponen Infrastrukrut.....	28





### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Letak Geografis Kabupaten Tebo .....	30
B. Topografi Kabupaten Tebo .....	31
C. Potensi Alam .....	32
D. Sumber Daya Manusia Atau Pejabat yang Ada di Kabupaten Tebo .....	35
E. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	36
F. Tata Pemerintahan.....	39
G. Sekilas Gambaran Tentang Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu.....	41

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu.....	45
B. Perbandingan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu.....	51
C. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu.....	61

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	72

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN CURICULUM VITAE**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021 .....	3
Tabel 1.2	: Alokasi Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021 .....	4
Tabel 1.3	: Data Pembangunan Infrastruktur Kesehatan Di Kabupaten Tebo ...	5
Tabel 3.1	: Luas Wilayah Kabupaten Tebo .....	31
Tabel 3.2	: Nama Pejabat Kabupaten Tebo .....	35
Tabel 4.1	: Banyak Transportasi di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu .....	51
Tabel 4.2	: Ketersediaan Sarana Energi (Kelistrikan) di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu.....	53
Tabel 4.3	: Ketersediaan Sarana Komunikasi di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu .....	54
Tabel 4.4	: Ketersediaan Sarana Pendidikan di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu.....	56
Tabel 4.5	: Ketersediaan Sarana Kesehatan di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu.....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	: Peta Wilayah Kecamatan Rimbo Bujang.....	41
Gambar 3.2	: Peta Wilayah Kecamatan Tebo Ulu .....	43
Gambar 4.1	: Kondisi Jalan di Kecamatan Tebo Ulu.....	46
Gambar 4.2	: Kondisi Jalan di Kecamatan Rimbo Bujang .....	48



## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HLM	: Halaman
HA	: Hektare
KM	: Kilometer
MUSRENBANG	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MA	: Madrasah Aliyah
QS	: Qur'an Surah
RA	: Raudhatul Athfal
RENSRA	: Rencana Strategis
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
S/D	: Sampai Dengan
TK	: Taman Kanak-kanak
UIN	: Universitas Islam Negeri

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses menuju arah yang jauh lebih maju secara terencana yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, teknologi, kelembagaan dan budaya.<sup>1</sup> Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala hal yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.<sup>2</sup>

Kabupaten Tebo merupakan satu diantara Kabupaten di dalam wilayah Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemerintah Kabupaten Tebo terdiri dari 12 Kecamatan dan 112 Desa/Kelurahan, terdiri dari 107 desa dan 5 kelurahan.<sup>3</sup>

Wilayah Kabupaten Tebo mempunyai tanah yang berkualitas cukup baik dalam jenis dan penyebarannya sehingga memungkinkan untuk pengembangan usaha pertanian. Di daerah ini terdapat empat jenis tanah, yakni jenis Tanah Podzolik merupakan yang terbesar yaitu 438.000 Ha (67,79%), selanjutnya adalah

---

<sup>1</sup> Murba, "Infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone", Skripsi Uin Alauddin Makassar, (2017), hlm. 5.

<sup>2</sup> Sondang P.Siagan, *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Srateginya*, Edisi Kedua, (Jakarta: Bumi Ankasa, 2001), hlm. 35.

<sup>3</sup> Kantor Bappeda Kabupaten Tebo, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022, Gambaran Umum Kondisi Daerah*, hlm. 1.



Latusol 204.600 Ha (31,67%), Aluvial 2.200 Ha (0,34%) dan Organosol 1.300 Ha (0,20%). Kabupaten Tebo memiliki kawasan hutan sebesar 43,30% (279.785,95 Ha) dari total luas wilayah, dimana menurut fungsinya terdiri dari 5,14% (33.219,80 Ha) Hutan Pelestarian Alam; 2,82% (18.251,46 Ha) adalah Hutan Produksi Terbatas; 0,79% (5.093,12 Ha) digunakan untuk Hutan Lindung dan 34,55% (223.221,56 Ha) adalah Hutan Produksi. Penggunaan lahan terbesar kedua adalah lahan perkebunan karet yaitu sebesar 114.147 Ha dari total luas wilayah Kabupaten Tebo. Sedangkan untuk penggunaan sawah hanya meliputi areal seluas 10.522 Ha dari luas areal Kabupaten Tebo. Kemudian penggunaan lahan terkecil adalah untuk permukiman dimana luasnya hanya 0,71% dari luas Kabupaten Tebo.<sup>4</sup>

Dilihat dari potensi yang ada di Kabupaten Tebo maka dipandang perlu untuk pembangunan infrastruktur yang bisa menjamin dan meningkatkan perkembangan ekonomi wilayah, pembangunan infrastruktur salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi daerah, artinya dengan peningkatan pembangunan infrastruktur maka secara tidak langsung perkembangan ekonomi juga akan meningkat. Melihat realita yang ada di Kabupaten Tebo terus berbenah dari segi infrastruktur, baik dalam pembangunan jalan, jembatan, gedung-gedung, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang gunanya untuk peningkatan penerimaan daerah dan juga perkembangan ekonomi daerah.

Tujuan dan kebijakan pembangunan daerah merupakan suatu yang ingin dicapai dalam priode yang direncanakan. Merujuk kepada evaluasi pembangunan

<sup>4</sup> Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2021. Hlm. 4-6.

Tahun 2017 serta perumusan permasalahan dan tantangan pada Tahun 2021, maka tujuan dan kebijakan pembangunan daerah mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021 yaitu: “Menuju Tebo Tuntas 2021; (Tebo Terti, Unggul, Tentram, Adil dan Sejahtera)”. Tujuan dan kebijakan pada pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021**

No	Tujuan	Arah Kebijakan	Program Pembangunan
1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pembangunan aksesibilitas (jalan) antar wilayah kecamatan</li> <li>• Meningkatkan akses air bersih diseluruh Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program penyelenggaraan jalan</li> <li>• Program penyediaan, pengelolaan dan pengembangan air bersih</li> </ul>
2	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan pendidikan	Meningkatkan dan pemeratakan kualitas akses infrastruktur pendidikan	Program pengelolaan pendidikan
3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayan kesehatan	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
4	Meningkatnya	• Meningkatkan kualitas	• Program

akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	<p>perencanaan pembangunan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah</li> </ul>	<p>perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program penyelenggaraan pengawasan</li> </ul>
---	--	---

Sumber: Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2021

Tujuan dan kebijakan pembangunan merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang direncanakan, terintegrasi, dan konsisten teradap pencapaian kebijakan pembangunan daerah yang berdampak pada pembangunan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tebo.

**Tabel 1.2**

**Alokasi Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2021**

No	Kecamatan	APBB
1	Tebo Ilir	252.362.103
2	Muaro Tabir	199.154.764
3	Tebo Tengah	350.586.002
4	Sumay	99.010.312
5	Tengah Ilir	204.690.046
6	Rimbo Bujang	3.015.555.465

7	Rimbo Ulu	805.590.318
8	Rimbo Ilir	204.571.149
9	Tebo Ulu	292.296.739
10	VII Koto	293.922.071
11	Serai Serumpun	62.397.933
12	VII Koto Ilir	29.341.184

Sumber: BPS Kabupaten Tebo Tahun 2018-2022

**Tabel 1.3**

**Data Pembangunan Infrastruktur Kesehatan Di Kabupaten Tebo Tahun 2021**

No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Posyandu
1	Tebo Ilir	-	13
2	Muaro Tabir	-	18
3	Tebo Tengah	1	16
4	Sumay	-	14
5	Tengah Ilir	-	18
6	Rimbo Bujang	1	47
7	Rimbo Ulu	-	25
8	Rimbo Ilir	-	12
9	Tebo Ulu	-	37
10	VII Koto	-	12
11	Serai Serumpun	-	8
12	VII Koto Ilir	-	15

Sumber: BPS, kabupaten Tebo Dalam Angka 2022.

Kecamatan Rimbo Bujang memiliki luas wilayah 406,92 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 66,830 jiwa, dengan rincian 35,096 orang laki-laki dan 31,734 orang perempuan. Alokasi anggaran pajak bumi dan bangunan yang diterima Kecamatan Rimbo Bujang sebesar Rp3.015.555.465 dalam waktu lima tahun terakhir yaitu pada Tahun 2017 s/d 2021. Dengan alokasi anggaran pajak bumi dan bangunan yang cukup besar ini seharusnya banyak pembangunan yang dapat dilakukan. Seperti pembangunan jalan, sarana dan prasarana kesehatan, sarana dan saran pendidikan dan lain-lain.<sup>5</sup> Sedangkan Kecamatan Tebo Ulu memiliki luas wilayah 410.30 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 33.001 jiwa dengan rincian 16.708 orang laki-laki dan 16.303 orang perempuan. Alokasi anggaran pajak bumi dan bangunan yang diterima Kecamatan Tebo Ulu sebesar Rp292.296.739 dalam waktu lima tahun terakhir yaitu Tahun 2017 s/d 2021. Dengan anggaran yang tergolong kecil ini pembangunan di Kecamatan Tebo Ulu tergolong lebih sedikit yaitu berupa penyediaan air bersih, pembangunan jalan dan sarana prasarana kesehatan.<sup>6</sup>

Kecamatan Rimbo Bujang adalah Kecamatan yang paling maju di Wilayah Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel 1.2 alokasi anggaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Rimbo Bujang paling besar dibandingkan dengan Kecamatan-kecamatan lainnya. Tingkat pendidikan yang tinggi, pembangunan fasilitas yang mumpuni, serta pembangunan infrastruktur yang baik. Kecamatan Rimbo Bujang menjadi tempat percontohan Eks Lokasi Transmigrasi yang

<sup>5</sup> Kantor Bappeda Kabupaten Tebo, *Kecamatan Rimbo Bujang Dalam Angka Tahun 2018*, hlm. 27-115.

<sup>6</sup> Kantor Bappeda Kabupaten Tebo, *Kecamatan Tebo Ulu Dalam Angka Tahun 2018*, hlm. 27-115.

berhasil. Sedangkan berdasarkan tabel 1.3 di atas ketersediaan sarana kesehatan di Kecamatan Tebo Ulu lebih rendah dan belum maju dibandingkan Kecamatan Rimbo Bujang, serta infrastruktur jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Tebo Ulu dengan Kecamatan Rimbo Bujang, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Pasalnya, terhitung sudah lima tahun lebih kondisi jalan tersebut kian memprihatinkan, dengan banyak bagian jalan yang berlubang. Tak hanya itu, kondisi jalan yang relatif lebih sempit membuat pengendara mesti waspada. Jalan tersebut merupakan akses masyarakat yang kerap digunakan untuk memperpendek jarak tempuh jika ingin berpergian menuju Kecamatan Rimbo Bujang. Masyarakat Kecamatan Tebo Ulu mengharapkan hal ini segera ditindaklanjuti oleh pihak pemangku kebijakan, dikarenakan melihat kondisi jalan yang rusak parah ditambah lagi mobilitas warga yang cukup tinggi.

Dengan alokasi anggaran pajak bumi yang berbeda dan ketersediaan pembangunan infrastruktur sarana kesehatan di Kecamatan Rimbo Bujang lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Tebo Ulu pasti akan terdapat perbandingan pembangunan infrastruktur di kedua Kecamatan ini.

Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu dalam hal pembangunan juga melakukan hal yang sama yaitu melakukan pembangunan di berbagai aspek. Seperti, aspek ideologi, politik, ekonomi, social, budaya, dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan.



Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik dan berkeinginan untuk meneliti tentang **Analisis Perbandingan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menarik rumusan yang akan diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu?
- b. Bagaimana perbandingan pembangunan infastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu?
- c. Bagaimana kebijakan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu?

## C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan bagian dari upaya untuk mengerucutkan topik pembahasan materi topik penelitian. Sehingga diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan harapan serta mudah dipahami dan dimengerti. Adapun fokus utama atau batasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada kebijakan pembangunan infrastruktur dalam pembangunan aksesibilitas, ketersediaan air bersih, ketersediaan energi, ketersediaan telekomunikasi, dan ketersediaan fasilitas umum di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun 2017-2021 berdasarkan tolak ukur indikator pengukuran keberhasilan pembangunan.



## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu.
- b. Untuk mengetahui perbandingan pembangunan infastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu.
- c. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk wahana literasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu pemerintahan pada bidang pembangunan infrastruktur.
- b. Sebagai sebuah sarana bagi peneliti dalam mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu yang didapat peneliti selama menempuh jenjang perkuliahan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, kajian ataupun media pembelajaran serta perbandingan bagi kalangan akademika terutama mahasiswa agar dapat membantu menambah wawasan serta membandingkan teori dan kenyataan di lapangan.





- d. Penelitian ini juga dijadikan bahan untuk memenuhi syarat agar memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Pembangunan Infrastruktur

Teori pembangunan infrastruktur menekankan pentingnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang memadai dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Infrastruktur, seperti jalan raya, jaringan listrik dan air bersih adalah faktor kunci dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>7</sup>

### 2. Teori Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Teori ini menekankan bahwa investasi terhadap pembangunan infrastruktur fisik, seperti jaringan transportasi, jaringan listrik, atau telekomunikasi, dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Para ahli seperti Robert Solow dan Paul Romer telah mengemukakan teori yang menyoroti peran infrastruktur dalam meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya logistik, dan memfasilitasi investasi dan pertumbuhan sektor ekonomi.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Intan Suswita, Darwin Damanik, Pawan Darasa Panjaitan, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 2 No. 1 2020, hlm. 3.

<sup>8</sup> Intan Suswita, Darwin Damanik, Pawan Darasa Panjaitan, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun ... , hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

### 3. Teori Pembedayaan Masyarakat

Teori ini menyatakan bahwa pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek infrastruktur. Dalam konteks ini, para ahli seperti Robert Chambers dan Pauline Rose telah memperkuat pentingnya partisipasi masyarakat dan pendekatan bawah ke atas dalam pembangunan infrastruktur.<sup>9</sup>

### 4. Teori Modal Sosial

Teori ini menyatakan bahwa pentingnya modal sosial dalam pembangunan infrastruktur. Modal sosial melibatkan hubungan sosial, kepercayaan, dan jaringan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan infrastruktur, para ahli seperti Elinor Ostrom telah menggambarkan bagaimana modal sosial yang kuat dapat meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan manfaat dari infrastruktur.<sup>10</sup>

### 5. Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur sebagai berikut:

<sup>9</sup> Intan Suswita, Darwin Damanik, Pawan Darasa Panjaitan, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun ..., hlm. 3.

<sup>10</sup> Intan Suswita, Darwin Damanik, Pawan Darasa Panjaitan, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun ... , hlm. 3.

a. Aksesibilitas

Indikator ini mencakup jarak dan waktu tempuh antara berbagai wilayah serta ketersediaan infrastruktur transportasi seperti jalan raya, jembatan, dan rambu lalu lintas. Aksesibilitas yang baik dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah akses ke pasar dan sumber daya.

b. Ketersediaan Air Bersih

Ketersediaan air bersih yang baik dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

c. Ketersediaan Energi

Indikator ini mencakup ketersediaan dan aksesibilitas listrik dan bahan bakar. Ketersediaan energi yang bagus bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

d. Ketersediaan Telekomunikasi

Indikator ini mencakup ketersediaan jaringan telekomunikasi seperti telepon, internet, dan jaringan seluler. Ketersediaan telekomunikasi yang baik dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung perkembangan bisnis dan industri.

e. Ketersediaan Fasilitas Umum

Indikator ini mencakup ketersediaan fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah. Ketersediaan fasilitas umum yang bagus bisa

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung perkembangan sosial dan budaya.<sup>11</sup>

Indikator-indikator ini bisa digunakan sebagai pengukur tingkat pembangunan infrastruktur dalam Negara atau Wilayah. Namun, perlu diingat pembangunan infrastruktur yang sukses membutuhkan perencanaan yang baik, alokasi sumber daya yang memadai, serta manajemen yang efektif untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penjelasan mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki topik atau tema yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Naskah-naskah akademik seperti jurnal, skripsi, tesis, hingga disertasi merupakan beberapa bahan karya ilmiah yang sering dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sendiri berfungsi untuk memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilakukan maupun sebagai bahan kajian untuk memahami masalah yang akan di teliti. Kesesuaian dengan tema maupun topik yang dibahas akan menjadi penentu pemilihan bahan kajian dalam tinjauan pustaka.

Sejauh ini ada beberapa hasil penelitian terkait dengan kajian Analisis Perbandingan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan

<sup>11</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, “Teori dan Indikator Pembangunan”, (Admin Bappeda, 16 Februari 2017), <https://bappeda.bulelengkap.go.id/informasi/detail/artikel/teori-dan-indikator-pembangunan-12>, diakses pada 1 Desember 2022.

Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, seperti penelitian Norman, Dr. Muh Jamal Amin, M.Si, Budiman, S.IP., M.Si yang dimuat dalam e-jurnal ilmu pemerintahan dengan judul penelitian “Perbandingan Pembangunan Desa Karya Jaya Dan Pemabangunan Desa Tani Bakti Di Kecamatan Samboja Kabupaen Kutai Kartanegara”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat persamaan-persamaan pembangunan baik fisik dan non fisik, persamaannya ialah pembangunan jalan, sarana prasarana perairan, pelatihan di bidang kesehatan dan pertanian. Sedangkan perbedaan-perbedaan pembangunan fisik dan non fisiknya ialah penyediaan sarana perairan yang berbeda fungsi. Serta terdapatnya faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pembangunan di kedua desa ini.

Skripsi Linda Tustiana Puspitawati, “Analisis Perbandingan Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Kawasan Kedungsapur”, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2013. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata Kabupaten/Kota yang memiliki sektor basis adalah sektor pertanian memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, sedangkan disebagian besar Kabupen/Kota di Kawasan Kedungsapur memiliki sektor basis pada sektor pertanian.

Penelitian Rory Novia Fitriani, “Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus: Perbandingan Pembangunan Infrastruktur Desa Plangitan Kecamatan Pati Dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)”. Univesitas Diponegoro, Tahun 2017. Dalam penelitian ini membahas mengenai langkah atau kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, perlu

diletakan dalam suatu kesatuan dengan daerah penyelenggaraan pembangunan desa tidak terlepas dari kesadaran setiap penduduk yang tinggal di Desa tersebut, partisipasi dari masyarakat merupakan suatu syarat yang dapat menjamin keberhasilan pembangunan yang pada hakikatnya pembangunan desa adalah suatu proses modernisasi yang mengantarkan masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia ke arah penghidupan yang lebih baik di masa depan.

Adapun pemilihan bahan kajian tinjauan pustaka ini didasarkan pada relevansi materi topik dan tema pembahasan dengan penelitian ini. Pemilihan bahan kajian ini tentu melalui pertimbangan yang matang. Selain bahan kajian yang disebutkan dalam tinjauan pustaka, peneliti juga menggunakan karya-karya ilmiah lainnya baik berupa jurnal, naskah, akademik, maupun buku-buku yang sesuai dengan penelitian ini sebagai bahan referensi.

## G. Metode Penelitian

### 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Karena Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk membangun daerah berdasarkan penelitian bidang pembangunan dan kemasyarakatan, penyusunan pola dasar daerah, penyusunan program pembangunan tahunan, hingga perancangan anggaran pembangunan di Kabupaten Tebo.

Adapun waktu dalam penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, yaitu pada tanggal 04 April s/d 04 Juni 2023.





## 2. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Perbandingan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif dipilih sebagai langkah untuk menganalisis secara mendalam dan terperinci permasalahan dan fenomena yang ada di dalam penelitian ini. Mengutip pandangan *Creswell* yang mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.<sup>12</sup> Dalam memperoleh data penelitian perlu dilakukan wawancara dan memerlukan partisipan. Pengajuan pertanyaan untuk memperoleh informasi dari partisipan merupakan kunci dalam wawancara. Melalui data yang diperoleh maka akan didapatkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisa secara mendalam untuk memperoleh jawaban dari fenomena yang diteliti.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, pendekatan ini dapat dihubungkan dengan penelitian metode perbandingan. Penelitian metode perbandingan disebut juga dengan penelitian metode komparatif. Menurut Suharsimi Arikuto, penelitian metode komparatif akan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap

<sup>12</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 6.

orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Pendapat tersebut diperkuat lagi oleh Muhammad Nasir, yang mengatakan bahwa penelitian metode komparatif memiliki tujuan, yaitu:

- a. Penelitian metode komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu.
- b. Untuk membandingkan dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan maksud ingin memberikan data terperinci terkait Analisis Perbandingan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Dalam metodologi penelitian secara umum ada dua jenis data yang sering digunakan, yaitu Data *Primer* dan Data *Sekunder*. Data *primer* adalah data yang didapat langsung dari sumber penelitian atau tempat penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer mencakup semua informasi, fakta, dan fakta yang relevan atau relevan

<sup>13</sup> Tita Rosita dan Nandang Rukanda, *Studi Komparatif Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat*, (Cimahi: Ikif Siliwangi, 2020), hlm. 1-2.



UNIVERSITAS ISLAM  
SUMATERA UTARA

SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN  
J A M B I



dengan penelitian, yang keterkaitan atau derajat relevansinya sangat jelas.<sup>14</sup> Data ini didapat melalui wawancara dan observasi. Dikatakan data primer karena data yang tercantum merupakan penentu utama berhasil tidaknya suatu penelitian. Oleh karena itu, data primer merupakan elemen penting dalam sebuah penelitian.

Data primer dalam penelitian ini merupakan semua data yang diperoleh dari wawancara dan observasi selama penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini Narasumber yang menjadi Informan dari unsur Analisis Perbandingan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi meliputi Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah, Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Litbang. Adapun Informan dari unsur non pemerintah meliputi masyarakat setempat. Dalam wawancara dengan warga setempat ini, akan dipilih beberapa masyarakat sebagai perwakilan dari masyarakat setempat.

Kemudian sumber data *sekunder*, adapun data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang didapat secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini didapat dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah didapat dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>15</sup> Pada penelitian ini sumber data sekunder bisa

<sup>14</sup> Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, Terj. Tri Wibowo B.S, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 91.

<sup>15</sup> Yudi Armansyah, (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial Fakultas Syariah UIN STS Jambi*, (Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020), hlm. 49-50.



UNIVERSITAS ISLAM  
SUMATERA UTARA

SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN  
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diperoleh melalui dokumen-dokumen dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo.

#### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah *literature-literature* yang mendukung penelitian ini baik berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, koran, majalah, maupun tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Sumber-sumber data yang digunakan merupakan karya-karya ilmiah resmi yang telah dipublikasi dan relevan dengan tema serta topik penelitian ini.

#### 5. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar kejadian sosial seperti misalnya kegiatan individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, menentukan informan penelitian merupakan bagian yang sangat penting. Salah satu cara yang dipakai adalah *purposive sampling* atau *sampling non random*. Dalam hal ini peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menentukan ciri-ciri khusus sesuai dengan tujuan dan untuk menjawab permasalahan penelitian. Ada dua hal penting dalam aspek ini yaitu: *sampling non random* dan menetapkan ciri khusus. Para informan dalam penelitian merupakan aktor-aktor kunci yang diperkirakan mengetahui atau bahkan terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Jumlah yang diwawancarai disesuaikan dengan kebutuhan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka ditentukan unit analisis yang menjadi informan dalam penelitian adalah pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Masyarakat setempat.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi merupakan bagian dari pengumpulan data. Observasi meliputi pengumpulan data secara langsung di lapangan. Observasi juga berarti bahwa peneliti bersama partisipan. Oleh karena itu, peneliti tidak hanya membaca sekilas, tetapi bersama memberi peneliti banyak informasi yang tersembunyi dan mungkin tidak terungkap selama wawancara.<sup>16</sup>

Observasi dipahami sebagai kegiatan manusia sehari-hari yang menggunakan indera mata sebagai alat utama di samping indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Jadi, metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui observasi dan penemuan.<sup>17</sup> Observasi menjadi penting dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Umumnya pengamatan dalam penelitian kualitatif adalah observasi. Selain

<sup>16</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya...*, hlm. 112.

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 118.

itu, ada pengamatan yang masing-masing menyangkut beberapa masalah, yaitu: (1) Tingkat keterlibatan peneliti, (2) mengamati fokus, (3) Sikap peneliti, dan (4) lamanya pengamatan.

## b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih yang berbicara secara lisan melalui kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendapatkan ide dari sumber yang berbeda.<sup>18</sup> Melalui wawancara, peneliti akan menemukan wawasan yang lebih dalam tentang interpretasi situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak dapat ditemukan melalui observasi. Wawancara bertujuan untuk menemukan jawaban atas masalah secara lebih terbuka, dimana orang yang diwawancarai diajak untuk memberikan pendapat dan pandangannya. Selama wawancara, peneliti harus mendengarkan dengan seksama dan mencatat apa yang dikatakan informan.

Setidaknya ada dua macam jenis wawancara yang sering digunakan, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tak-terstruktur. Dalam wawancara terstruktur bahan-bahan wawancara akan dipersiapkan dengan teliti sebelum dilaksanakannya wawancara. Sedangkan wawancara tak-terstruktur malah sebaliknya, menghindari ketatnya struktur bahan.

Dalam penelitian ini orang-orang yang akan dipilih sebagai informan yaitu :

<sup>18</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif: Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke 21, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 231.

- 1) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah di Kantor Bappeda Kabupaten Tebo.
- 2) Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Litbang di Kantor Bappeda Kabupaten Tebo.
- 3) Perwakilan dari Masyarakat.

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu teknik ini mengidentifikasi sumber dan pola data dengan beberapa pertimbangan. Misalnya, seorang informan yang ditunjuk dianggap paling mengetahui data yang kita butuhkan, atau seseorang yang di yakini dapat mempermudah kita untuk mengambilnya kembali. Oleh karena itu, informan yang dipilih ialah mereka yang dianggap mampu memberikan jawaban atas permasalahan penelitian ini.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, informasi atau data-data tertulis yang bisa dijadikan sebagai informasi dalam penelitian, dokumen dapat berupa foto hasil penelitian sebelumnya, buku-buku yang relevan dengan penelitian.<sup>19</sup> Dokumen tertulis seperti peraturan, kebijakan dokumen visual, seperti foto, gambar, sketsa, dll. Yang melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses sistematis menyusun atau mempelajari data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, dan

<sup>19</sup> Yudi Armansyah, (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm. 67-68.

dokumen dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menggambarannya sebagai satu kesatuan, menyusunnya menjadi model, memilih mana yang penting dan mana yang akan digunakan. Menarik kesimpulan yang mudah dipahami sendiri dan orang lain. Analisis data yang digunakan adalah model analisis data induktif, yaitu analisis yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.<sup>20</sup>

Analisis data dalam penelitian ini diterapkan dengan tiga teknik yaitu, mereduksi data yang didapatkan melalui proses wawancara. Data-data wawancara yang telah direkam ataupun ditulis kemudian ditranskripkan dengan maksud agar mempermudah peneliti dalam memilah data-data yang sesuai untuk dianalisis. Data-data ini berhubungan dengan Analisis Perbandingan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Data-data yang telah ditranskripkan kemudian disajikan melalui pemisahan dan pemetaan data-data yang mirip ke dalam bagian-bagian tertentu yang sudah diberi tanda. Langkah berikutnya yaitu membuat rangkuman inti dari setiap aspek yang diteliti. Untuk langkah terakhir adalah membuat kesimpulan sementara dari data-data yang telah terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan melakukan pengecekan ulang data-data asli yang telah diperoleh.

<sup>20</sup> Agus Salim, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 22.

## BAB II

### PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

#### A. Pengertian Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional dan digunakan sebagai langkah untuk mensejahterakan warganya melalui peran partisipasinya. Pembangunan infrastruktur juga merupakan jantung pertumbuhan ekonomi nasional. Infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Lebih dari itu, infrastruktur juga merupakan salah satu faktor penentu dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

Bagi Indonesia, infrastruktur bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Banyak studi dan diskusi yang menyimpulkan demikian. Mantan presiden Bank Dunia Robert B Zoellick mengatakan, infrastruktur yang minim merupakan salah satu dari tiga penyebab mengapa Negara berpendapatan menengah terperangkap dan tidak mampu beranjak menjadi Negara maju.

Oleh karena itu, merupakan satu keharusan bagi pemerintah di Negara berkembang untuk menetapkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk membangun infrastuktur. Tanpa komitmen yang kuat, Negara berkembang mungkin akan terjebak pada kondisi pertumbuhan yang stagnan. Untuk memenuhi keterbatasan anggaran infrastruktur, pemerintah telah dan membuka lebar peluang bagi swasta, baik dari dalam maupun dari luar negeri, untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka diri kepada swasta untuk masuk dengan melakukan skema

seperti sekuritisasi yakni penjualan piutang kepada investor supaya korporasi mendapatkan dana. Infrastruktur telah menciptakan konektivitas, tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sendiri, tetapi juga menggeliatkan ekonomi di daerah lain. Dengan demikian, upaya pemerataan bangunan infrastruktur antar daerah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kegiatan perekonomian.

Pembangunan infrastruktur akan berhasil optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, manakala pemerintah mampu memetakan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan roda kegiatan ekonomi, terutama di daerah. Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki keunggulan masing-masing, baik dari sisi kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kapasitas institusi. Pemetaan kebutuhan di tiap daerah itu perlu dilakukan guna menentukan jenis infrastruktur yang diperlukan, seperti kebutuhan jalan, jembatan, pasar, perbankan, pelabuhan, irigasi, dan listrik.

Penyediaan jenis infrastruktur yang tepat tidak hanya akan mengurangi ketimpangan, tapi juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan usaha serta kesempatan kerja. Sejatinya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan kemakmuran. Namun, kegagalan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat atas jenis infrastruktur yang diperlukan, pembangunan infrastruktur tidak akan berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Kementerian Republik Indonesia, [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita\\_media/baca/11744/Pembangunan-infrastruktur-dan-peningkatan-kapabilitas](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/11744/Pembangunan-infrastruktur-dan-peningkatan-kapabilitas). Diakses, 23 Agustus 2023.



## B. Landasan Teori

### 1. Pembangunan Infrastruktur

Menurut Sondang P. Siagan Pembangunan infrastruktur merupakan suatu atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala hal yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.<sup>22</sup>

### 2. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu keadaan di mana ada perbaikan. Menurut siagan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara dan pemerintah.<sup>23</sup>

Selanjutnya menurut Ginanjar Kartasmita pembangunan adalah upaya berkesenambungan menciptakan keadaan yang menyediakan lebih banyak alternatif yang sah bagi setiap masyarakat untuk mencapai aspirasinya yang paling *humanistic*. Pada umumnya aspirasi yang paling *humanistic* tersebut dinyatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin sebagai landasan tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Sondang P.Siagan, *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Srateginya...*, hlm. 35.

<sup>23</sup> Nurman, "*Strategi Pembangunan Daerah*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 87-95.

<sup>24</sup> Ali Kabul Mahmi dan Sri Tri Indra Trigunarjo, "*Perencanaan Pembangunan Daerah*", Cetakan Pertama, (Kebayoran: Kencana, 2017), hlm. 29.





### 3. Infrastruktur

Menurut grigg, infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, bangunan, gedung dan fasilitas publik lainnya, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial ataupun kebutuhan ekonomi.<sup>25</sup>

Menurut Stone, infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau digunakan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air bersih, tenaga listrik, pembuangan limbah, transfortasi dan pelayanan lainya guna memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi atau pun sosial.<sup>26</sup>

Secara teknik, pengertian infrastruktur disebut sebagai aset fisik yang dibuat pada sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Maka dari itu, infrastruktur adalah bagian-bagian yang berupa sarana dan prasarana yang tidak akan terpisahkan satu sama lain yang didefinisikan dalam suatu sistem.

### C. Jenis Pembangunan Infrastruktur

#### 1. Infrastruktur Keras

Jenis infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang bisa kita lihat dari segi fisiknya yang berupa bentuk secara nyata. Biasanya jenis infrastruktur ini mencakup jalan raya, jembatan, sekolah, saluran irigasi, pelabuhan, bandara, dan jenis fasilitas umum lainnya.

<sup>25</sup> Sry Devi Tarigan Rahnat syumanjaya, Jurnal “Analisis Pengaruh Kualitas Infrastruktur jalan terhadap harga-harga hasil pertanian di Kecamatan dolok silau”. Diakses pada Rabu 28 September 2022. (21:53 PM).

<sup>26</sup> [Http://www.radarplanologi.com/2015/11/infrastruktur-dalam-pembangunan-ekonomi-indonesia.html](http://www.radarplanologi.com/2015/11/infrastruktur-dalam-pembangunan-ekonomi-indonesia.html). diakses, Rabu 28 September 2022, (22:45 PM).

## 2. Infrastruktur Keras Non Fisik

Infrastruktur jenis ini mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung sarana prasarana secara umum yang berguna untuk mendukung berbagai kegiatan sosial serta ekonomi masyarakat umum. Contoh, terkait pengadaan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan penyediaan pasokan listrik, serta upaya yang berhubungan dengan pengadaan sumber pasokan energi.

## 3. Infrastruktur Lunak

Jenis infrastruktur ini merupakan semua hal yang berperan sebagai penunjang kelancaran berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat luas. Dimana hal itu tidak terlihat bentuk fisik dan wujudnya secara kasat mata. Umumnya hal tersebut bergerak di dalam suatu aturan, sistem, dan juga norma yang disediakan oleh pihak pemerintah maupun pihak lain. Contoh, penerapan etika kerja yang baik dan benar, layanan publik, peraturan yang dibuat oleh pemerintah mencakup Undang-undang yang berisi mengenai aturan hukum perdagangan dan lain sebagainya.

### D. Komponen Infrastruktur

Mengacu pada *American Public Works Associations*, komponen infrastruktur sebenarnya mencakup semua jenis fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat maju dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh, pengadaan air bersih beserta pengelolaannya atau *water treatment*, pengadaan pengendalian banjir, sistem pengaturan air limbah, penyediaan limbah, penyediaan fasilitas navigasi lintas air. Selain itu, ada juga pembangunan kemajuan transportasi yang mencakup



fasilitas umum berupa transportasi air, udara, dan laut. Kemudian juga berbagai komponen pendukung lain untuk kemajuan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat secara umum. Komponen infrastruktur dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

### 1. Komponen Infrastruktur yang Mempunyai Input

Karakteristik dari komponen jenis ini berfokus pada jenis infrastruktur yang bisa memberikan hasil atau masukan untuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Contohnya, pasokan sumber air bersih dan sumber listrik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat secara umum.

### 2. Komponen Infrastruktur yang Mengambil Output

Karakteristik dari komponen jenis ini berfokus pada pengambilan output yang diperoleh dari kegiatan masyarakat umum. Contohnya, sistem pembuangan sampah dan limbah, sistem pendukung *drainase* atau saluran air, dan lain sebagainya.

### 3. Komponen Infrastruktur Gabungan dari Keduanya

Karakteristik dari komponen jenis ini biasanya berfokus pada gabungan dari dua jenis komponen satu dan dua. Dimana komponen yang satu ini berfokus pada proses pemberian dan juga pengembalian suatu hal dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Contoh, penggunaan jaringan telekomunikasi dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-infrastruktur/>, diakses Kamis, 24 Agustus 2023.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### A. Letak Geografis Kabupaten Tebo

Secara astronomis Kabupaten Tebo terletak antara  $0^{\circ} 52' 32''$  -  $01^{\circ} 54' 50''$  LS dan  $101^{\circ} 48' 57''$  -  $102^{\circ} 49' 17''$  BT. Daerah ini beriklim tropis, dimana 84,96% daerahnya berada pada ketinggian  $<99$  M dari permukaan laut. Berdasarkan posisi geografis Kabupaten Tebo mempunyai batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau; sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin; sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Bungo; dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kabupaten Tebo merupakan satu di antara kabupaten di dalam wilayah Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemerintah Kabupaten Tebo terdiri dari 12 Kecamatan dan 112 desa/kelurahan, terdiri dari 107 desa dan 5 kelurahan.

Kabupaten Tebo memiliki luas wilayah 646.100 Ha ( $6.461 \text{ km}^2$ ) atau 12,88 % dari luas Provinsi Jambi. Wilayah kecamatan terluas adalah Sumay yakni  $1.268 \text{ Km}^2$  atau 19.63% dari luas Kabupaten Tebo dan yang wilayah paling

kecil adalah Kecamatan Rimbo Ilir dengan luas 214.34 Km<sup>2</sup> atau 3.32% dari luas Kabupaten Tebo.<sup>28</sup> Seperti terlihat pada gambar dan tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Tebo**

No	Kecamatan	Nama Ibu Kota	Luas	
			Km <sup>2</sup>	%
1	Tebo Ilir	Sungai Bengkal	708,70	10,97
2	Muara Tabir	Pintas Tuo	509,30	7,88
3	Tebo Tengah	Muara Tebo	983,56	15,22
4	Sumay	Teluk Singkawang	1.268,00	19,63
5	Tengah Ilir	Mengupeh	221,44	3,43
6	Rimbo Bujang	Wirotho Agung	406,92	6,30
7	Rimbo Ulu	Suka Damai	295,74	4,58
8	Rimbo Ilir	Karang Dadi	214,34	3,32
9	Tebo Ulu	Pulau Temiang	410,30	6,35
10	VII Koto	Sungai Abang	658,79	10,20
11	Serai Serumpun	Sekutur Jaya	315,70	4,89
12	VII Koto Ilir	Balai Rajo	468,21	7,25
Jumlah			4.641,00	100,00

Sumber: RPJMD Kabupaten Tebo 2017-2022.

## B. Topografi Kabupaten Tebo

Kabupaten Tebo merupakan dataran rendah, sedikit berbukit dan rawa-rawa dengan kemiringan bervariasi. Daerah rawa terdapat di sepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Tabir dan Batang Sumay. Panjang sungai yang membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam Kabupaten Tebo adalah

<sup>28</sup> Kantor Bappeda Kabupaten Tebo, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022..., hlm. 1.

Sungai Batanghari 300 Km, Sungai Batang Tebo 29 Km, Sungai Batang Tabir 52 Km, Sungai Batang Sumay 70 Km, Sungai Batang Langsisip 23 Km dan Sungai Batang Jujuhan 7 Km.

Berdasarkan ketinggian Kabupaten Tebo dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu daerah dataran rendah dengan ketinggian <50 M di Kecamatan Tebo Ilir, dataran rendah dengan ketinggian 50 – 100 M di Kecamatan Tebo Tengah dan Rimbo Bujang. Daerah dataran tinggi dengan ketinggian sedang diantara 100 – 1000 M di Kecamatan Sumay.<sup>29</sup>

## C. Potensi Alam

### 1. Hutan dan Isinya

Pada subsektor kehutanan hasil pemetaan kawasan hutan Kabupaten Tebo memiliki kawasan hutan seluas 286.784,30 Ha, yang terdiri dari kawasan hutan lindung bukit limau 6.667 Ha, kawasan hutan TNBT 23.000 Ha, kawasan TNB Duabelas 8.100 Ha, kawasan Taman hutan raya bukit sari 110 Ha, kawasan hutan produksi terbatas hulu sekalo 4.725 Ha, kawasan hutan produksi terbatas sungai sirih 8.325 Ha, kawasan hutan produksi terbatas Sungai sragen hulu danau bangko 20.450 Ha, kawasan hutan produksi pasir mayang 183.762 Ha, kawasan hutan produksi tabir kejasung 16.438 Ha, kawasan hutan produksi batang tabir 11.700 Ha. selain itu juga terdapat hutan rakyat seluas 1.263 Ha, kondisi sumber daya hutan tersebut secara umum sedang mengalami proses degradasi fungsi yang disebabkan oleh illegal logging dan illegal penggunaan kawasan hutan, guna untuk mengantisipasi

<sup>29</sup> Kantor Bappeda Kabupaten Tebo, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah...*, hlm. 1.

kerusakan hutan ini seluruh jajaran pemerintah telah mengupayakan pengawasan dan penanganan hutan secara terpadu.

Luas hutan yang mencapai 281.210 Ha (43,52%) dari luas total Kabupaten Tebo, ini dapat digunakan sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sebagai penopang sistem kehidupan. Disamping itu saat ini jumlah kawasan konservasi (hutan lindung Bukit Limau, TNBT, taman nasional bukit dua belas, hutan Penelitian, kebun raya bukit sari) yang juga berfungsi sebagai penopang sistim kehidupan (*life support system*) seperti dapat menjaga ketahanan air di Kabupaten Tebo.

Berdasarkan hasil penelitian, nilai jasa ekosistem hutan jauh lebih besar dari nilai produksi kayunya. Diperkirakan nilai hasil hutan kayu hanya sekitar 7% dari total nilai ekonomi hutan, sisanya adalah hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan. Dewasa ini permintaan terhadap jasa lingkungan mulai meningkat, khususnya untuk air minum kemasan, objek penelitian, wisata alam.<sup>30</sup>

## 2. Air Dan Sungai

Manusia dan makhluk hidup lainnya harus menjaga sumber daya alam, salah satu sumber alam itu adalah air. Agar sumber daya alam tersebut tetap bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. Penggunaan air sebagai bermacam kebutuhan seharusnya digunakan sebaik mungkin untuk mempertimbangkan kebutuhan hidup sekarang dan kehudupan selanjutnya sungai merupakan penyedia air untuk manusia dalam berbagai macam kebutuhan diantaranya

<sup>30</sup> <https://tebokab.go.id/page/kehutanan.html>. Diakses, Sabtu, 03 Desember 2022.





industri, dalam air berubah naik turun menurut musim, dan tingkat nitrat pertanian, serta domestik. Selain itu, sungai adalah ekosistem yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup dan salah satu dari siklus hidrologi.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Menurut PP 38 Tahun 2011 memiliki fungsi untuk tempat mengalirnya air yang terletak dibagian terendah dalam bumi, akibatnya keadaan sungai tidak bisa terpisahkan dari keadaan Daerah Aliran Sungai. Kualitas sediaan air berhubungan dengan kegiatan manusia dilingkungan tersebut dan kualitas sediaan air yang berasal dari daerah tangkapan akan mempengaruhi kualitas air.

Sungai adalah suatu sistem yang sangat dinamis, dimana kegiatan manusia di wilayah aliran sungai dapat mempengaruhi kualitas air dari hulu hingga hilir. Aktivitas di wilayah aliran sungai seperti tempat tinggal penduduk, pertanian, dan industri berakibat pada adanya bahan pencemar kealiran sungai. Kualitas air sungai akan dipengaruhi oleh adanya bahan pencemar tersebut. Apabila kualitas air tidak mencapai kriteria baku mutu maka kualitas air sungai tersebut dikatakan menurun, dan air tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jai2>. Diakses, Sabtu, 03 Desember 2022.

#### D. Sumber Daya Manusia Atau Pejabat yang Ada di Kabupaten Tebo

**Tabel 3.2**  
**Nama Pejabat Kabupaten Tebo**

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan
1	Dr. H. Sukandar, S.Kom., M.Si	Bupati Tebo	2016 – sekarang
2	Syahlan, SE	Wakil Bupati Tebo	2016 – sekarang
3	M Habibi, ST., ME	Camat Tebo Ilir	2019 – sekarang
4	Samsul Hidayat, S.Pi	Camat Muara Tabir	2019 – sekarang
5	Deprianto, S.Pt., M.Si	Camat Tebo Tengah	2020 – sekarang
6	Ambiar, SST	Camat Sumay	2019 – sekarang
7	Asbahani, SKM	Plt Camat Tengah Ilir	2020 – sekarang
8	Richi Shaputra, S.STP	Camat Rimbo Bujang	2019 – sekarang
9	Tuslam, S.Pt., M.Si	Camat Rimbo Ulu	2020 – sekarang
10	Ir. Sad Budi Suparyadi	Camat Rimbo Ilir	2020 – sekarang
11	Fadri. B, S.Pd	Camat Tebo Ulu	2019 – sekarang
12	Alfian, A.Ma. Pd	Camat VII Koto	2019 – sekarang
13	Aripin, S.Pd	Camat Serai Serumpun	2019 – sekarang
14	Muhammad Syarif, SE.,ME	Camat VII Koto Ilir	2018 – sekarang

*Sumber: Sumber Daya Manusia, Kabupaten Tebo Dalam Angka Tahun 2021*



## E. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

### 1. Kedudukan

Bappeda adalah pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintah yang kedudukannya di bawah tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### 2. Susunan Organisasi

- a. Sekretariat, membawahkan 2 (dua) Subbagian terdiri dari:
  - 1) Subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
  - 2) Subbagian umum, kepegawaian dan aset.
- b. Bidang Perekonomian, membawahkan 3 (tiga) Subbidang terdiri dari:
  - 1) Subbidang pertanian dan pariwisata;
  - 2) Subbidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; dan
  - 3) Subbidang pengembangan dunia usaha
- c. Bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintahan, Sosial dan Budaya, membawahkan 3 (tiga) Subbidang terdiri dari:
  - 1) Subbidang sumber daya manusia dan kependudukan;
  - 2) Subbidang pemerintahan umum; dan
  - 3) Subbidang sosial dan budaya.
- d. Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan 3 (tiga) Subbidang terdiri dari:
  - 1) Subbidang perencanaan dan pendanaan;
  - 2) Subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan



- 3) Subbidang penelitian, pengembangan, data dan sistem informasi.
- e. Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah membawahkan 3 (tiga) Subbidang terdiri dari:
- 1) Subbidang sarana dan prasarana infrastruktur;
  - 2) Subbidang perencanaan ruang dan wilayah; dan
  - 3) Subbidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan pembangunan wilayah.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 3. Tugas dan Fungsi Bappeda

#### a. Tugas Bappeda

- 1) Membangun daerah berdasarkan penelitian bidang pembangunan dan kemasyarakatan;
- 2) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- 3) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pembinaan UPT dan Jabatan Fungsional;
- 6) Penyusunan program pembangunan tahunan; dan
- 7) Perancangan anggaran bangunan.

#### b. Fungsi Bappeda

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian, pengembangan;



- 2) Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian, pengembangan;
- 3) Pengoordinasian pembinaan penelitian, pendataan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- 4) Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian, pengembangan; dan
- 5) Pengaturan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
- 6) Pengoordinasian penelitian dan pengembangan;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian, pengembangan; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

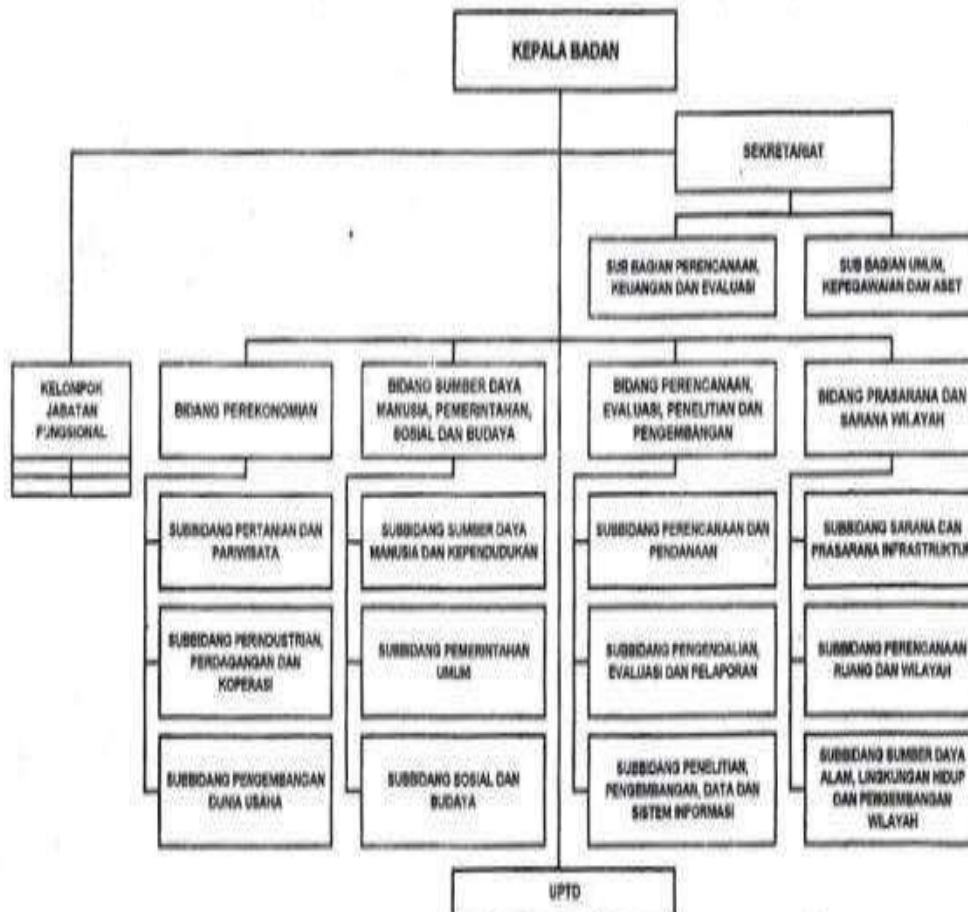


**F. Tata Pemerintahan**

**1. Struktur Organisasi**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEBO  
 NOMOR : 91 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 3 Desember 2019  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 BERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DA  
 PENELITIAN, PENGEMBANGAN KABUPATEN TEBO

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
 PENELITIAN, PENGEMBANGAN KABUPATEN TEBO (TIPE A)**



BUPATI TEBO,  
  
 SUKANDAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

## 2. Visi, Misi dan Motto

### a. Visi

Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (MAJU BERSAMA AGRIBISNIS).

### b. Misi

- 1) Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas yaitu manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya, berilmu pengetahuan, cerdas sehat, dan terampil.
- 2) Mewujudkan daerah agribisnis yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai basis bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- 3) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memadai dan maju.
- 4) Mewujudkan Kabupaten Tebo yang aman, tertib, dan tentram.
- 5) Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 6) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

### c. Motto

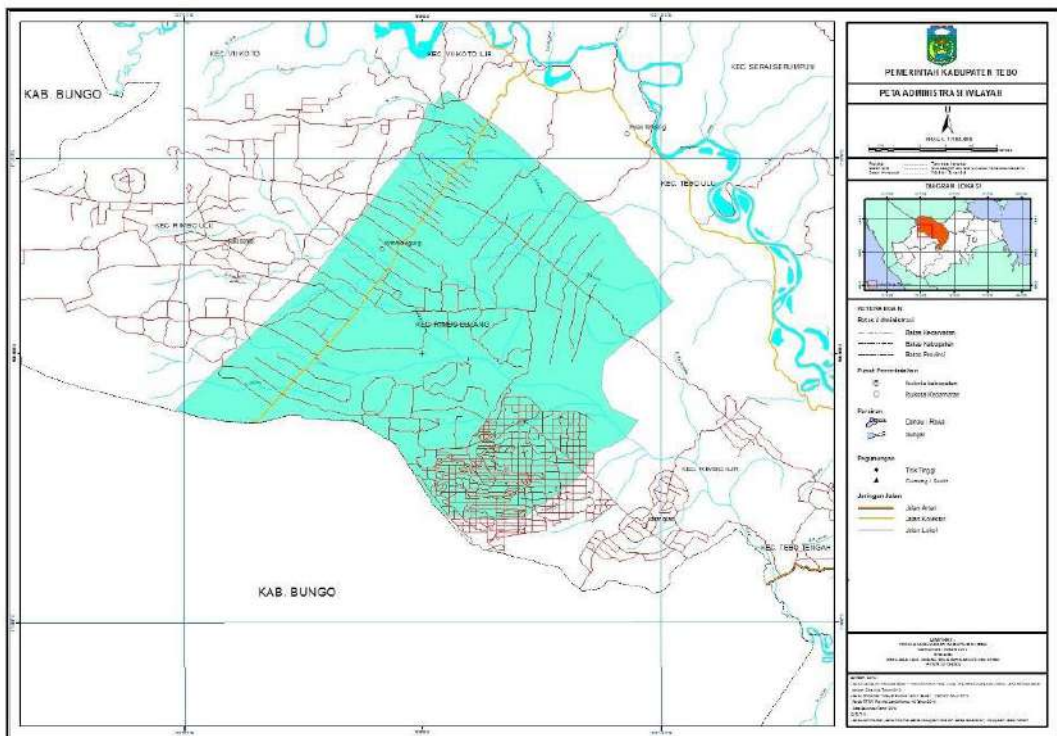
“(Seentak Galah Serengkuh Dayung)”<sup>32</sup>.

<sup>32</sup> Kantor Bappeda Kab. Tebo, *Rencana Strategis Bappeda Kab. Tebo 2022*, hlm. 36-43.

## G. Sekilas Gambaran Tentang Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu

### 1) Kecamatan Rimbo Bujang

**Gambar 3.1**  
**Peta Wilayah Kecamatan Rimbo Bujang**



Sumber : Kecamatan Rimbo Bujang Dalam Angka 2022

Kecamatan Rimbo Bujang terletak antara 1,18 sampai dengan 1,35 Lintang Selatan dan antara 102,32 sampai 102,37 Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Rimbo Bujang adalah 406,92 km<sup>2</sup> atau 6,60% dari luas Kabupaten Tebo. Jarak dari ibukota Kecamatan Rimbo Bujang ke beberapa ibukota kecamatan dalam Kabupaten Bungo dan Tebo adalah; Wirotho Agung – Muara Bungo: 32 km, Wirotho Agung – Sungai Bengkal: 148 km, Wirotho Agung –



UNIVERSITAS ISLAM  
SUMATERA UTARA

SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN

J A M B I

© Hak cipta milik UIN Suftha Jambi

State Islamic University of Sulfhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Muara Tebo: 40 km, Wirotho Agung – Pulau Temiang: 26 km. Batas-batas Kecamatan Rimbo Bujang; Sebelah Utara: Kecamatan Tebo Ulu, Sebelah Timur: Kecamatan Rimbo Ilir, Sebelah Selatan: Kabupaten Bungo, Sebelah Barat: Kecamatan Rimbo Ulu.<sup>33</sup>

Sebelum Kecamatan Rimbo Bujang dimekarkan, Kecamatan Rimbo Bujang merupakan bagian dari Kecamatan Tebo Ulu. Lalu, pada tanggal 22 Oktober 1991 dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 1991 oleh Presiden Soeharto tentang Pembentukan Kecamatan Batin XXIV, Muaro Sebo, dan Pelayung di Kabupaten Batanghari, Kecamatan Jujuhan, Tanah Sepenggal, dan Rimbo Bujang di Kabupaten Bungo Tebo, Kecamatan Pengabuan, Mendahara, dan Rantau Rasau di Kabupaten Tanjung Jabung.

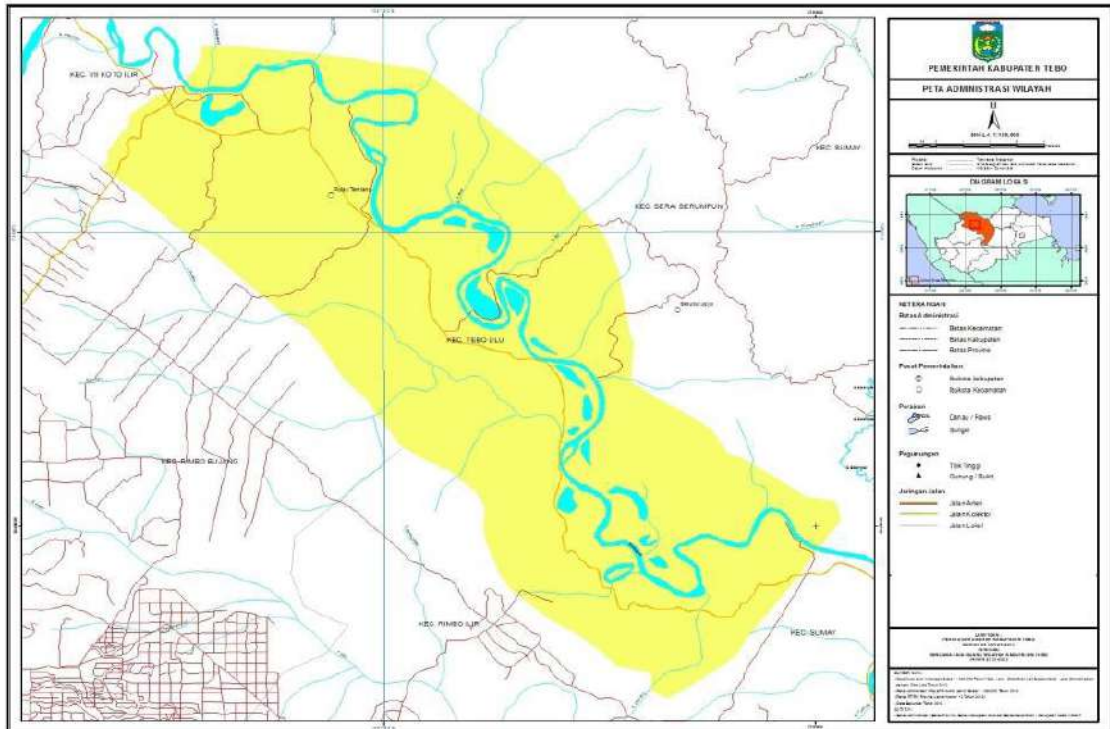
Tahun 1991 terdiri dari 19 Desa dan 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Wiritho Agung, Desa Perintis, Desa Rimbo Mulyo, Desa Purwo Harjo, Desa Tegal Arum, Desa Tirta Kencana, Desa Septa Mulya, Desa Suka Maju, Desa Suka Damai, Desa Wonorejo, Desa Sumber Sari, Desa Sido Rukun, Desa Giriwinangun, Desa Sido Rejo, Desa Krang Dadi, Desa Giri Purno, Desa Sumber Agung, Desa Pulung Rejo, Desa Sari Mulyo, Desa Pematang Sapat, Desa Sungai Pandan.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Kantor Bappeda Kab. Tebo, *Kecamatan Rimbo Bujang Dalam Angka 2022*, hlm. 3.

<sup>34</sup> <https://sidakpost.id/23/04/2018/sejarah-rimbo-bujang-diantara-dua-kawedanan/>, diakses Kamis, 24 Agustus 2023.

## 2) Kecamatan Tebo Ulu

**Gambar 3.2**  
**Peta Wilayah Kecamatan Tebo Ulu**



Sumber : Kecamatan Tebo Ulu Dalam Angka 2022

Kecamatan Tebo Ulu terletak antara 1,12 sampai dengan 1,26 Lintang Selatan dan antara 102,12 sampai 102,25 Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Tebo Ulu adalah 410,30 km<sup>2</sup> atau 6,35% dari luas Kabupaten Tebo. Jarak dari ibukota Kecamatan Tebo Ulu ke beberapa ibukota kecamatan dalam Kabupaten Bungo dan Tebo adalah; Pulau Temiang – Sekutur Jaya: 17 km, Pulau Temiang – Karang Dai: 38 km, Pulau Temiang – Wirotho Agung : 23 km, Pulau Temiang – Teluk Singkawang: 33 km, Pulau Temiang – Balai Rajo: 12 km. Batas-batas Kecamatan Tebo Ulu; Sebelah Utara: Kecamatan

Serai Serumpun, Sebelah Timur: Kecamatan Sumay, Sebelah Selatan: Kecamatan Rimbo Ilir, Sebelah Barat: Kecamatan Rimbo Bujang.<sup>35</sup>

Sejak awal orde baru Kecamatan Tebo Ulu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bungo Tebo. Kemudian pada Tahun 1989 keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 136-936 tentang Pembentukan Bupati Wilayah Barat dan Pembantu Bupati Wilayah Timur. Dengan pembentukan wilayah Pembantu Bupati Kabupatrn Bungo Tebo tersebut, Kecamatan Tebo Ulu, Tebo Tengah, Tebo Ilir, dan Rimbo Bujang merupakan wilayah Pembantu Bupati Wilayah Timur yang berkedudukan di Muaro Tebo. Wilayah Pembantu Bupati Wilayah Timur inilah yang kemudian menjadi Wilayah Kabupaten Tebo.<sup>36</sup>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>35</sup> Kantor Bappeda Kabupaten Tebo, *Kecamatan Tebo Ulu Dalam Angka Tahun 2022*, hlm. 3-4.

<sup>36</sup> Sejarah Kabupaten Tebo, Muaro Tebo di Masa Orde Baru, hlm. 92.

## BAB IV

### ANALISIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN RIMBO BUJANG DAN KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

#### A. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu

Dilihat dari potensi yang ada di Kabupaten Tebo maka dipandang perlu untuk pembangunan infrastruktur yang bisa menjamin dan meningkatkan perkembangan ekonomi wilayah, pembangunan infrastruktur salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi daerah, artinya dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur maka secara tidak langsung perkembangan ekonomi juga akan meningkat. Melihat realita yang ada di Kabupaten Tebo terus berbenah dari segi infrastruktur, baik dalam pembangunan jalan, pendidikan, dan sarana kesehatan yang gunanya untuk peningkatan penerimaan daerah dan juga perkembangan ekonomi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Maryati seorang penjual gorengan selaku masyarakat di Kecamatan Rimbo Bujang, beliau mengatakan:

“Alhamdulillah dengan bagusnya pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang memudahkan saya dalam berjualan dan bisa mendapatkan banyak pelanggan selama berjualan dan juga memudahkan saya untuk pergi ke layanan kesehatan karna jalan nya sudah bagus sehingga membuat jarak tempuh dari rumah ke puskesmas terasa lebih dekat dan untuk sarana kesehatan di Rimbo Bujang juga sudah sangat lengkap jadi saya tidak perlu pergi jauh-jauh lagi untuk cek kesehatan”.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ibu Maryati, penjual gorengan selaku masyarakat Kecamatan Rimbo Bujang, 19 Mei 2023.

Jalan penghubung antara Kecamatan Tebo Ulu dengan Kecamatan Rimbo Bujang, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Pasalnya terhitung sudah lima tahun lebih kondisi jalan tersebut kian memprihatinkan, dengan banyaknya bagian jalan yang berlubang. Tak hanya itu, kondisi jalan yang relatif lebih sempit membuat pengendara mesti waspada. Jalan tersebut merupakan akses masyarakat yang kerap digunakan untuk memperpendek jarak tempuh jika ingin berpergian menuju Kecamatan Rimbo Bujang. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Uvi seorang pekerja honorer di Kecamatan Tebo Ulu yang sering melewati jalan tersebut, dalam wawancara penelitian yang di lakukan, beliau menyampaikan bahwa:

“kondisi jalan yang banyak lubang dan jalannya sempit buat pengendara susah ngelewatannya, dan juga kadang anak sekolahan juga susah melintas kadang ado jugo yang sampai dak jadi pergi ke sekolah karno lantaran kalu hari hujan air ngenang di jalan yang belubang tu”<sup>38</sup>

**Gambar 4.1**  
**Kondisi Jalan di Kecamatan Tebo Ulu**



<sup>38</sup> Wawancara dengan Uvi, Pekerja Honorer Kecamatan Tebo Ulu, 27 September 2022.



Sarana infrastruktur menjadi hal yang cukup penting untuk di gunakan masyarakat akan tetapi melihat infrastruktur jalan yang kurang memadai menjadikan masyarakat malas menggunakan sarana tersebut. Masalah ini juga mengganggu aktivitas warga desa yang ada di sekitar, sebab banyak warga yang harus melewati jalan tersebut untuk menuju ke tempat kerja dan kebun-kebun miliknya.

Rimbo Bujang adalah kecamatan yang paling maju di wilayah Kabupaten Tebo, dengan jumlah penduduk paling tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi dan pembangunan infrastruktur yang baik dengan karakteristik masyarakatnya yang suka gotong royong. Rimbo bujang menjadi tempat percontohan Eks Lokasi Transmigrasi yang berhasil Tahun 2009. Rimbo Bujang mulai menampakkan jati dirinya di dunia Nasional sebagai Nominator Lomba Posyandu Tingkat Nasional dalam meningkatkan infrastruktur Kecamatan Rimbo Bujang terus berbenah sampai saat ini di lihat dari investigasi Bhayangkara Indonesia com Pemkab Tebo Provinsi Jambi telah menganggarkan dana Lima miliar lebih untuk pemeliharaan

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

rutin jalan lintas Tebo-Rimbo Bujang, atau jalan dari Simpang Pal. 12 Tebo Tengah menuju Jalan 21 Rimbo Bujang. Pada pelaksanaannya, pemeliharaan jalan tersebut dilaksanakan secara swakelola, dan saat ini hasil dari pemeliharaan jalan itu tengah diaudit oleh BPK.<sup>39</sup>

**Gambar 4.2**  
**Kondisi Jalan di Kecamatan Rimbo Bujang**



Berdasarkan teori infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Robert Solow dan Paul Romer investasi terhadap pembangunan infrastruktur fisik, seperti jaringan transportasi, jaringan listrik, atau telekomunikasi, dapat memicu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya logistik. Akan tetapi dalam konteks Kecamatan Tebo Ulu alokasi anggaran pajak bumi dan pembangunannya hanya sejumlah Rp292.296.739 sehingga tingkat fasilitas pembangunan dan tingkat pemeliharaan

<sup>39</sup> Surat Perjanjian Swakelola Nomor : 01/KONT/RHB-JLN/PUPR/2020

pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tebo Ulu sangat rendah dibandingkan Kecamatan Rimbo Bujang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Septiansyah selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah beliau mengatakan:

“untuk pembangunan di Kecamatan Tebo Ulu sudah duluan di bangun, maknyo banyak bangunan yang lah rusak, tinggal pemeliharaannyo be lagi yang harus ditingkatkan, dan kareno keterbatasan anggaran jadi kito susah untuk membangun dan untuk perbaikan infrastruktur yang sudah rusak itu tidak bisa diperbaiki secara langsung dan sekaligus, cuma bisa bertahap sehingga dak banyak infrastruktur yang kito benahi secara langsung, Cuma biso membenahi secara bertahap. Sedangkan pembangunan di Kecamatan Rimbo Bujang baru 10-5 tahun terakhir ini la dibangun, dan jugo karno faktor mobilitas di Kecamatan Rimbo Bujang lebih tinggi di banding Kecamatan Tebo Ulu dan jugo faktor dari pado jumlah penduduk Kecamatan Rimbo Bujang yang 3 kali lipat lebih banyak dari pado Kecamatan Tebo Ulu sehingga anggaran yang dibutuhkan jugo lebih besar. Dan banyaknyo ekstramigrasi atau pendatang di Kecamatan Rimbo Bujang yang membuat keluarga mereka lebih banyak dari luar yang membuat tingkat ekonominya lebih tinggi karena kebutuhan belanja yang besar dibandingkan Kecamatan Tebo Ulu yang banyak penduduk asli”.<sup>40</sup>

Juga dijelaskan oleh Bapak Eko Nuryanto, S.STP selaku Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Litbang, beliau mengatakan :

“Kenapa pembangunan di Kecamatan Rimbo Bujang lebih maju di banding Kecamatan Tebo Ulu?, karena saat kami menentukan prioritas pembangunan apa yang mau dibangun. Yang kami lihat itu potensi kemudian luas wilayah, kemudian kepadatan penduduk, yang kita kejar saat ini pembangunan infrastruktur yang pertama akses terhadap ekonomi masyarakat mana yang paling mendesak. Apa disitu ada sarana prasarana atau belum, maka itulah yang akan menjadi pertimbangan untuk membangun pembangunan di satu kecamatan dan

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Septiansyah, selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah, 22 Mei 2023.



kita lihat proporsi apakah masing-masing kecamatan sudah ada pembangunan infrastrukturnya atau belum”.<sup>41</sup>

Dilihat dari gambar 4.1 dan gambar 4.2 dan berdasarkan hasil dari wawancara di atas yang menjelaskan mengenai pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang lebih maju dibandingkan Kecamatan Tebo Ulu, adapun faktor yang menyebabkan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang lebih maju dibandingkan Kecamatan Tebo Ulu ialah sebagai berikut :

- a. Alokasi anggaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tebo Ulu yang tergolong rendah dan alokasi anggaran yang setiap tahunnya tidak sama;
- b. Mobilitas Kecamatan Rimbo Bujang yang tinggi;
- c. Jumlah penduduk Kecamatan Rimbo Bujang yang tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan Kecamatan Tebo Ulu;
- d. Banyaknya masyarakat pendatang di Kecamatan Rimbo Bujang yang membuat tingkat ekonominya lebih tinggi; dan
- e. Rendahnya tingkat pemeliharaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tebo Ulu, sehingga banyak infrastruktur yang rusak.

Keluhan-keluhan yang telah dikemukakan oleh beberapa masyarakat sekitar sudah mewakili keresahaan masyarakat secara umum. Kurangnya pembangunan infrastruktur dan rendahnya tingkat pemeliharaan pembangunan di Kecamatan Tebo Ulu, semoga dapat menarik perhatian pemerintah dan

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Nuryanto, S.STP, selaku Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Litbang, 22 Mei 2023.

masyarakat sekitar untuk segera dibenahi dan diberikan solusi agar pembangunan di Kecamatan Rimbo Bujang dan Tebo Ulu tidak ada yang tertinggal.

## B. Perbandingan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu

Berdasarkan teori pembangunan infrastruktur yang menekankan pentingnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang memadai dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Infrastruktur, seperti jalan raya, jaringan listrik dan air bersih, adalah faktor kunci dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut APWA (*American Public Works Association*), komponen pembangunan terdiri dari beberapa hal berikut:

### 1. Ketersediaan Transportasi: Jalan Raya, Jembatan dan Rambu Lalu Lintas.

**Tabel 4.1**

#### Banyak Transportasi di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu.

a. Banyaknya Transportasi di Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2017 s/d 2021.

No	Rincian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jalan Aspal (Km)	168,31	248,76	869,45	869,45	915,54
2	Jalan diperkeras (Km)	22,32	22,32	22,32	558,69	609.61
3	Jalan Masih Tanah (Km)	222,37	141,92	141,92	0	0
2	Jembatan Beton/Besi	10	10	10	10	10



3	Jembatan Kayu	2	2	2	2	2
4	Rambu Lalu Lintas	1	1	1	1	1

Sumber: Kecamatan Rimbo Bujang Dalam Angka 2018-2022.

b. Banyaknya Transportasi di Kecamatan Tebo Ulu Tahun 2017 s/d 2021.

No	Rincian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jalan Aspal (Km)	72,32	71,38	67,16	67,16	67,16
2	Jalan diperkeras (Km)	20,57	15,25	15,25	15,25	15,25
3	Jalan Masih Tanah (Km)	92,89	86,63	86,63	86,63	86,63
2	Jembatan Beton/Besi	10	10	10	13	13
3	Jembatan Kayu	3	3	3	3	3
4	Rambu Lalu Lintas	0	0	0	0	0

Sumber: Kecamatan Tebo Ulu Dalam Angka 2018-2022

Berdasarkan tabel 4.1 di atas terlihat bahwa pembangunan infrastruktur transportasi di Kecamatan Rimbo Bujang lebih maju di bandingkan Kecamatan Tebo Ulu. Bukti lapangan menunjukkan kondisi infrastruktur transportasi di Kecamatan Tebo Ulu sudah banyak mengalami kerusakan, dapat di lihat pada Tahun 2019-2022 presentasi jalan aspal mengalami penurunan yang diakibatkan oleh banyaknya infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan dan dapat dilihat pada tabel diatas Kecamatan Rimbo Bujang terus berbenah dalam pembangunan infrastruktur jalan di setiap tahunnya. Namun dari segi infrastruktur jembatan Kecamatan Tebo Ulu lebih maju dibandingkan Kecamatan Rimbo Bujang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Septiansyah selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah.

“Kenapa di Kecamatan Rimbo Bujang pembangunan Infrastruktur transportasinya bagus sedangkan di Kecamatan Tebo Ulu sudah banyak yang rusak atau pecah-pecah dan berlobang, itu karena Kecamatan Rimbo Bujang baru di bangun dalam waktu sepuluh atau lima tahun belakang ini, Kecamatan Tebo Ulu sudah duluan di bangun dan tinggal pemeliharaannya be lagi dan untuk pemeliharaannya itu jugo tergantung dari prioritas, dan kalau untuk pembangunan jembatan itu tergantung dari prioritas penggunaannya”.<sup>42</sup>

## 2. Ketersediaan Energi (Kelistrikan): Produksi dan Distribusi Kepada Masyarakat

**Table 4.2**

### **Ketersediaan Energi (Kelistrikan) di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu.**

- a. Banyaknya Pengguna Listrik di Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2017 s/d 2021.

No	Rincian	2017	2018	2019	2020	2021
1	PLN	-	-	15.665	18.209	17.164
2	Non PLN	-	-	22	7	6
3	Bukan Pengguna Listrik	-	-	1.871	17	1

Sumber: Kecamatan Rimbo Bujang Dalam Angka 2018-2022

- b. Banyaknya Pengguna Listrik di Kecamatan Tebo Ulu Tahun 2017 s/d 2021.

No	Rincian	2017	2018	2019	2020	2021
1	PLN	-	-	10.320	10.490	10.490
2	Non PLN	-	-	0	0	0
3	Bukan Pengguna Listrik	-	-	142	87	87

Sumber: Kecamatan Tebo Ulu Dalam Angka 2018-2022

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Septiansyah..., 22 Mei 2023.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa ketersediaan energi (kelistrikan) di Kecamatan Rimbo Bujang lebih maju di dibandingkan Kecamatan Tebo Ulu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Eko Nuryanto S.STP selaku Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Litbang.

“Untuk penyaluran listrik di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu itu sudah 100% terealisasi ke masyarakat dan semua masyarakat sudah memakai listrik”.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Tebo Ulu masih ada masyarakat yang belum menggunakan listrik, hal ini tidak sama dengan pernyataan yang di kemukakan oleh bapak Eko Nuryanto S.STP selaku Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Litbang. Semoga hal ini bisa segera diatasi oleh pemerintahan setempat.

### 3. Persediaan Telekomunikasi

**Tabel 4.3**  
**Ketersediaan Sarana Komunikasi di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu**

- a. Banyaknya Sarana Komunikasi di Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2017 s/d 2021.

No	Rincian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kantor Pos	1	1	1	1	1
2	Warung Internet	12	12	12	12	12
3	Jasa Pengiriman Barang	7	7	7	7	7

*Sumber: Kecamatan Rimbo Bujang Dalam Angka 2018-2022*

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Nuryanto S.STP..., 22 Mei 2023.

- b. Banyaknya Sarana Komunikasi di Kecamatan Tebo Ulu Tahun 2017 s/d 2021.

No	Rincian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kantor Pos	1	1	1	1	1
2	Warung Internet	0	0	0	0	0
3	Jasa Pengiriman Barang	1	0	0	0	0

Sumber: Kecamatan Tebo Ulu Dalam Angka 2018-2022

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa ketersediaan sarana telekomunikasi di Kecamatan Rimbo Bujang lebih maju dibandingkan Kecamatan Tebo Ulu. Bukti lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan sarana telekomunikasi di Kecamatan Tebo Ulu masih jauh tertinggal di banding Kecamatan Rimbo Bujang dan juga untuk akses internet atau sinyal internet di Kecamatan Tebo Ulu juga masih kurang atau lambat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Eko Nuryanto S.STP selaku Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Litbang.

“Untuk Kantor Pos itu samo-samo kito bangun satu perkecamatan. Tapi memang untuk pelayanannya lebih tinggi di Kecamatan Rimbo Bujang dari pado Kecamatan Tebo Ulu, sebab jumlah penduduk lebih banyak Rimbo Bujang dari Tebo Ulu. Pun demikian penggunaan kantor pos dan jasa pengiriman barang itu kebanyakan yang menggunakannya itu dari orang-orang pendatang dari jadi hubungan keluar itu lebih banyak. Kalau di Kecamatan Tebo Ulu banyaknya penduduk asli, jadi jarang berhubungan dengan orang luar dan untuk jaringan internet kenapa di Rimbo Bujang itu sinyal nyo lebih kuat dibanding di Tebo Ulu itu tergantung dari jauh dekatnya tower, dan kenapa di Rimbo Bujang tower-nya lebih banyak dibandingkan Tebo Ulu, itu kareno di



Kecamatan Rimbo Bujang itu jumlah Penduduknya 3 kali lipat di banding Kecamatan Tebo Ulu”.<sup>44</sup>

Dapat dilihat juga pada tabel ketersediaan telekomunikasi di Kecamatan Tebo Ulu, ketersediaan warung internet tidak ada satupun, namun sebaliknya di Kecamatan Rimbo Bujang tersedia dua belas tempat warung internet untuk digunakan oleh masyarakat setempat. Begitu pula dengan ketersediaan jasa pengiriman barang di Kecamatan Tebo Ulu, pada Tahun 2017 Kecamatan Tebo Ulu memiliki satu jasa pengiriman barang, namun pada Tahun 2018 s/d Tahun 2021 jasa pengiriman barang sudah tidak ada lagi. Namun sebaliknya di Kecamatan Rimbo Bujang tersedia tujuh tempat jasa pengiriman jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat.

#### 4. Ketersediaan Gedung Publik: Sekolah dan Rumah Sakit

##### a. Gedung Sekolah

**Tabel 4.4**  
**Ketersediaan Sarana Pendidikan di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu**

1) Banyaknya Gedung Sekolah di Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2017 s/d 2021.

No	Sekolah	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Sekolah Umum</b>						
1	TK	22	22	22	21	21
2	SD	39	39	39	39	39

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Nuryanto S.STP....,22 Mei 2023.

3	SMP	12	12	12	13	13
4	SMA/SMK	12	13	13	14	14
<b>Sekolah Madrasah</b>						
1	RA	23	23	23	22	20
2	MI	9	9	10	10	11
3	MTs	12	12	14	15	15
4	MA	6	6	9	10	10

Sumber: Kecamatan Rimbo Bujang Dalam Angka 2018-2022.

- 2) Banyaknya Gedung Sekolah di Kecamatan Tebo Ulu Tahun 2017 s/d 2021.

No	Sekolah	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Sekolah Umum</b>						
1	TK	0	0	0	0	0
2	SD	28	28	28	28	28
3	SMP	7	7	7	7	7
4	SMA/SMK	4	4	4	4	4
<b>Sekolah Madrasah</b>						
1	RA	4	0	0	0	0
2	MI	5	6	5	5	5
3	MTs	4	4	5	5	5
4	MA	2	2	3	3	3

Sumber: Kecamatan Tebo Ulu Dalam Angka 2018-2022



Berdasarkan tabel 4.4 di atas terlihat bahwa sarana pendidikan di Kecamatan Rimbo Bujang lebih maju dibandingkan Kecamatan Tebo Ulu. Bukti lapangan menunjukkan fasilitas pendidikan di Kecamatan Rimbo bujang lebih tinggi dan bagus di bandingkan Kecamatan Tebo Ulu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Septiansyah selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah.

“Untuk pembangunan sekolah itu tergantung dari jumlah penduduk dan jumlah siswa, kenapa sekolah lebih banyak di bangun di Kecamatan Rimbo Bujang dibanding di Kecamatan Tebo Ulu?, itu Karena jumlah penduduknya lebih tinggi jadi fasilitas sekolahnya lebih ditingkatkan”.<sup>45</sup>

#### b. Gedung Rumah Sakit

**Tabel 4.5**  
**Ketersediaan Sarana Kesehatan di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu**

- 1) Banyaknya Gedung Rumah Sakit/Puskesmas di Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2017 s/d 2021.

No	Rincian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Puskesmas pembantu	5	5	5	5	16
2	Puskesmas	2	2	2	2	2
3	Rumah Sakit	1	1	1	1	1
4	Politeknik	4	4	4	4	4

Sumber: Kecamatan Rimbo Bujang Dalam Angka 2018-2022

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Septinsyah..., 22 Mei 2023



- 2) Banyaknya Gedung Rumah Sakit/Puskesmas di Kecamatan Tebo Ulu Tahun 2017 s/d 2021.

No	Rincian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Puskesmas pembantu	5	5	5	5	5
2	Puskesmas	2	2	2	2	2
3	Rumah Sakit	0	0	0	0	0
4	Politeknik	0	0	0	0	0

Sumber: Kecamatan Tebo Ulu Dalam Angka 2018-2022

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa pembangunan sarana kesehatan di Kecamatan Rimbo Bujang jauh lebih maju dibandingkan Kecamatan Tebo Ulu. Bukti lapangan menunjukkan bahwa bangunan dan fasilitas pembangunan sarana kesehatan di Kecamatan Rimbo Bujang lebih banyak dan lebih bagus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Septiansyah selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah.

“Untuk pembangunan infrastruktur seperti Puskesmas dan rumah sakit itu ketergantungan dengan jumlah pasien dan kenapa sarana kesehatan di Kecamatan Rimbo Bujang lebih maju?, itu kareno sebab ketergantungan dengan jumlah pasien itu tadi dan jumlah penduduk di Kecamatan Rimbo Bujang lebih banyak dibanding Keamatan Tebo Ulu. Jadi, fasilitasnyo lebih ditingkatkan kareno ketergantungan jumlah pasien yang masuk ke puskesmas atau rumah sakitnyo”.<sup>46</sup>

## 5. Ketersediaan Air Bersih

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Milenium Development Gols pemerintah

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Septiansyah..., 22 Mei 2023.

Kabupaten Tebo telah membangun unit layanan air bersih PDAM Tirta Muaro yang berpusat di Muara Tebo dan memiliki pengelolaan air bersih di Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Tebo. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Septiansyah selaku Kabid Prasarana dan Sarana Wilayah.

“Untuk pelayanan air bersih itu karena luas jangkauan dari PDAM ini jauh dari kawasan Tebo Ulu jadi belum sampai ke sano. Mako pemerintah kito membangun PAMSIMAS di Kecamatan Tebo Ulu. Sedangkan di Rimbo Bujang itu jangkauannya mudah jadi kito bangun PDAM disitu”.<sup>47</sup>

Berdasarkan teori modal sosial yang di kemukakan oleh Elinor Ostrom bahwa pentingnya modal sosial dalam pembangunan infrastruktur yang melibatkan hubungan sosial, kepercayaan, dan jaringan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan manfaat dari infrastruktur. Namun dapat diketahui Kecamatan Rimbo Bujang memiliki fasilitas yang cukup memadai dan lebih maju dalam pembangunan infrastruktur persediaan energi (kelistrikan), persediaan gedung publik, ketersediaan air bersih dibandingkan Kecamatan Tebo Ulu. Sedangkan Tebo Ulu memiliki fasilitas yang kurang lengkap namun pada pembangunan infrastruktur transportasi Kecamatan Tebo Ulu lebih maju dibandingkan Kecamatan Rimbo Bujang namun tingkat pemeliharaannya masih kurang yang membuat pembangunan infrastruktur transportasi di Kecamatan Tebo Ulu mengalami banyak kerusakan, maka diperlukan keterlibatan pemangku kebijakan dengan masyarakat serta pihak swasta dalam pengawasan, pemantauan,

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Septiansyah..., 22 Mei 2023.

dan pemeliharaan pembangunan infrastruktur sehingga terjalin hubungan sosial, kepercayaan serta kerjasama antara ketiganya.

### C. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu

Merujuk pada RPJMD Kabupaten Tebo, Maka kebijakan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan daerah. Seperti yang di nyatakan Bapak Septiansyah selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah.

“Kebijakan pembangunan itu sudah tertuang di dalam RPJM, itu sudah untuk 5 (lima) tahun, dan di tajamkan lagi dengan kita perioritaskan lagi pertahunnyo dan dengan mempertimbangkan potensi dan jumlah penduduk. Misal tahun ini pembangunan jalan yang kito perioritaskan tahun depannyo lagi pembangunan sarana kesehatan atau pendidikan yang di bangun”.<sup>48</sup>

Juga dijelaskan oleh Bapak Eko Nuryanto S.STP selaku Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Litbang, beliau mengatakan :

“Kebijakan-kebijakan untuk membangun infrastruktur yang baik itu saling terkoneksi. Artinya, seperti membangun infrastruktur jalan yang dilihat itu seberapa besar jalan tersebut berhubungan dengan berapa banyak dengan kecamatan yang terhubung dengan kecamatan tersebut. Prinsipnya pembangunannya itu saling terkoneksi. Jadi bisa untuk akses ekonomi memperlancar arus barang dan jasa, sehingga barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau kepasar itu dapat menjadi mudah. Dan untuk pembangunan sarana dan prasarana lainnya seperti pendidikan dan kesehatan itu tergantung dari prioritas”.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Septiansyah..., 22 Mei 2023.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Nuryanto, S.STP..., 22 Mei 2023.

Adapun kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tebo sebagai berikut:

### 1. Meningkatkan Pembangunan Aksesibilitas (Jalan) Antar Wilayah Kecamatan

Berdasarkan tabel 4.1 di atas bisa dilihat bahwa realiasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembangunan aksesibilitas (jalan) di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu pembangunan. Bukti lapangan menunjukkan kondisi infrastruktur transportasi di Kecamatan Tebo Ulu sudah banyak mengalami kerusakan, dapat di lihat pada Tahun 2019-2022 presentasi jalan aspal mengalami penurunan yang diakibatkan oleh banyaknya infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan seperti pada gambar 4.1, terlihat kondisi infrastruktur transportasi di Kecamatan Tebo Ulu sudah banyak mengalami kerusakan. Seperti salah satu jalan penghubung antara Kecamatan Tebo Ulu dengan Kecamatan Rimbo Bujang, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Pasalnya terhitung sudah lima tahun lebih kondisi jalan tersebut kian memprihatinkan, dengan banyaknya bagian jalan yang berlubang. Tak hanya itu, kondisi jalan yang relatif lebih sempit membuat pengendara mesti waspada. Jalan tersebut merupakan akses masyarakat yang kerap digunakan untuk memperpendek jarak tempuh jika ingin berpergian menuju Kecamatan Rimbo Bujang. dan dapat dilihat pada tabel 4.1 dan pada gambar 4.2 di atas Kecamatan Rimbo Bujang terus berbenah dalam pembangunan infrastruktur jalan di setiap tahunnya, serta sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Septiansyah selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah.



“Kenapa di Kecamatan Rimbo Bujang pembangunan Infrastruktur transportasinya bagus sedangkan di Kecamatan Tebo Ulu sudah banyak yang rusak atau pecah-pecah dan berlobang, itu karena Kecamatan Rimbo Bujang baru di bangun dalam waktu sepuluh atau lima tahun belakangan ini, Kecamatan Tebo Ulu sudah duluan di bangun dan tinggal pemeliharaannya be lagi dan untuk pemeliharaannya itu jugo tergantung dari prioritas, dan kalau untuk pembangunan jembatan itu tergantung dari prioritas penggunaannya”.<sup>50</sup>

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan aksesibilitas (jalan) antar kecamatan sudah terealisasikan hanya saja dalam pemeliharaan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Tebo ulu masih kurang diperhatikan, sehingga diakibatkan banyaknya infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan.

## 2. Meningkatkan Akses Air Bersih Diseluruh Kecamatan

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Milenium Development Gols pemerintah Kabupaten Tebo telah membangun unit layanan air bersih PDAM Tirta Muaro yang berpusat di Muara Tebo dan memiliki pengelolaan air bersih di Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Tebo. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Septiansyah selaku Kabid Prasarana dan Sarana Wilayah.

“Untuk pelayanan air bersih itu karena luas jangkauan dari PDAM ini jauh dari kawasan Tebo Ulu jadi belum sampai ke sano. Mako pemerintah kito membangun PAMSIMAS di Kecamatan Tebo Ulu. Sedangkan di Rimbo Bujang itu jangkauannya mudah jadi kito bangun PDAM disitu”.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Septiansyah..., 22 Mei 2023.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Septiansyah..., 22 Mei 2023.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akses air bersih diseluruh Kecamatan bisa dikatakan sudah terealisasi 100%, hanya saja karena jangkauan dari PDAM jauh dari kawasan Kecamatan Tebo Ulu. Maka, Pemerintah setempat membangun PAMSIMAS di Kecamatan Tebo Ulu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Septiansyah selaku Kabid Prasarana dan Sarana Wilayah pada wawancara di atas.

### 3. Meningkatkan dan Meratakan Kualitas Akses Infrastruktur Pendidikan

Berdasarkan tabel 4.4 di atas terlihat bahwa sarana pendidikan di Kecamatan Rimbo Bujang lebih maju dibandingkan Kecamatan Tebo Ulu. Bukti lapangan menunjukkan fasilitas pendidikan di Kecamatan Rimbo bujang lebih tinggi dan bagus di bandingkan Kecamatan Tebo Ulu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Septiansyah selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah.

“Untuk pembangunan sekolah itu tergantung dari jumlah penduduk dan jumlah siswa, kenapa sekolah lebih banyak di bangun di Kecamatan Rimbo Bujang dibanding di Kecamatan Tebo Ulu?, itu Karena jumlah penduduknya lebih tinggi jadi fasilitas sekolah nyo lebih ditingkatkan”.<sup>52</sup>

Pembangunan infrastruktur pendidikan dibangun berdasarkan skala prioritas, yaitu berdasarkan kepadatan penduduknya, seperti yang dijelaskan oleh bapak Septiansyah selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah pada wawancara di atas. Realisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan meratakan kualitas akses infrastruktur pendidikan

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Septiansyah..., 22 Mei 2023

sudah direalisasikan dengan baik. Hanya saja karena penduduk di Kecamatan Rimbo Bujang tiga kali lipat lebih banyak dari pada penduduk Kecamatan Tebo Ulu. Jadi, fasilitas sekolah di Kecamatan Rimbo Bujang lebih ditingkatkan.

#### 4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa pembangunan sarana kesehatan di Kecamatan Rimbo Bujang jauh lebih maju dibandingkan Kecamatan Tebo Ulu. Bukti lapangan menunjukkan bahwa bangunan dan fasilitas pelayanan pembangunan sarana kesehatan di Kecamatan Rimbo Bujang lebih banyak dan lebih bagus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Septiansyah selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah.

“Untuk pembangunan infrastruktur seperti Puskesmas dan rumah sakit itu ketergantungan dengan jumlah pasien dan kenapa sarana kesehatan di Kecamatan Rimbo Bujang lebih maju?, itu karena sebab ketergantungan dengan jumlah pasien itu tadi dan jumlah penduduk di Kecamatan Rimbo Bujang lebih banyak dibanding Kecamatan Tebo Ulu. Jadi, fasilitasnya lebih ditingkatkan karena ketergantungan jumlah pasien yang masuk ke puskesmas atau rumah sakitnya”.<sup>53</sup>

Pembangunan infrastruktur kesehatan dibangun berdasarkan skala prioritas, yaitu berdasarkan kepadatan penduduknya dan ketergantungan jumlah pasien yang masuk ke puskesmas ataupun rumah sakit di daerah tersebut. Realisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sudah direalisasikan dengan baik. Hanya saja karena penduduk di Kecamatan Rimbo Bujang tiga kali lipat lebih banyak dari pada penduduk Kecamatan Tebo Ulu. Jadi, bangunan dan

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Septiansyah..., 22 Mei 2023.



fasilitas pelayanan pembangunan sarana kesehatan di Kecamatan Rimbo Bujang lebih banyak dan lebih bagus dari pada Kecamatan Tebo Ulu.

## 5. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan infrastruktur diperlukan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah. Rencana kerja daerah biasanya dirumuskan ke dalam RENSRA yang diadakan satu tahun sekali seperti yang dinyatakan oleh Bapak Septiansyah selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah.

“Untuk melakukan pekerjaan seperti perbaikan pembangunan infrastruktur maka harus kita rumuskan dulu ke dalam RENSTRA dan disitulah awal dari perencanaan pembangunan yang akan kita laksanakan di daerah tersebut”.<sup>54</sup>

Jika kualitas anggaran Pemerintah Daerah rendah, maka kualitas fungsi-fungsi pemerintah cenderung lemah. Untuk mengantisipasi hal tersebut keterlibatan aparat pemerintah daerah beserta masyarakat diperlukan dalam suatu proses pengambilan keputusan secara bersama dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut.<sup>55</sup> Seperti yang dinyatakan Bapak Eko Nuryanto, S.STP selaku Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Litbang.

“Untuk alokasi dana di masing-masing Kecamatan di setiap tahunnya itu dak ado yang tetap dan setiap tahunnya beda-beda, itu sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing Kecamatan. Tergantung dari usulan masyarakat lewat musrembang, masyarakat mengusulkan apo nanti mano yang lebih penting mano yang mendesak. Untuk alokasi anggaran pembangunan pertahunnya itu tergantung dari pado prioritas

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Septiansyah..., 22 Mei 2022.

<sup>55</sup> Wahyu Suprianto, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Tahun 2012”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018), hlm. 46.

pencapaian pembangunan, apa yang mau kito bangun. Namun dengan APBD yang sangat terbatas, kami berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya dengan merealisasikan Pajak Pembangunan Daerah dari masyarakat dan Pajak-pajak lainnya untuk mengejar Keuangan yang berasal dari pusat yaitu APBN, karena semakin besar anggaran yang kito dapat maka makin banyak pembangunan yang biso kito bangun”.<sup>56</sup>

Dalam proses perencanaan, Bappeda Kabupaten Tebo memiliki peran penting dalam pembentukan ataupun perencanaan terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama, Bappeda melakukan penyusunan. Penyusunan ini dilakukan setiap bentuk perencanaan pembangunan daerah. Partisipasi publik tersebut dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran secara lisan dan dilakukan secara rasional, dan tepat sasaran. Seperti pernyataan Bapak Eko Nuryanto selaku Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Litbang.

“Pemerintah Dearah kito sudah menetapkan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Dearah atau yang kito sebut dengan Musrenbang untuk sarana dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Lewat Musrenbang itulah kito tau usulan-usulan dari masyarakat apa yang nanti yang harus di bangun dan mano yang harus di prioritaskan”.<sup>57</sup>

Kebijakan Pemerintah Dearah untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah sudah direalisasikan 100% baik di Kecamatan Rimbo Bujang maupun Kecamatan Tebo Ulu seperti yang disampaikan oleh bapak Eko Nuryanto selaku Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Litbang pada wawancara di atas, serta sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Nuryanto S.STP..., 22 Mei 2023.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Nuryanto, S.STP..., 22 Mei 2023.

Pembangunan Nasional, setiap daerah harus melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).<sup>58</sup>

## 6. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan penyelenggaraan terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan publik. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Kepala Daerah. DPRD melakukan Pengawasan badan eksekutif atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. DPRD melakukan pengawasan penyelenggaraan Kebijakan Publik terhadap pelaksanaan kebijakan, proses kebijakan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

DPRD memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan yang terjadi pada proses pembuatan kebijakan pembangunan infrastruktur. Terkait dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati bahwa DPRD disini berhak untuk bertindak apabila dalam suatu aturan itu melanggar Perundang-undangan yang berlaku maupun tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Tebo, sehingga DPRD juga dapat melakukan berbagai hal dalam pengawasan sehingga apa yang diinginkan oleh suatu aturan yang dibuat dapat terealisasi sesuai dengan kehendak dari aturan tersebut.

Pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas dilapangan saja, tetapi pengawasan pun dilakukan melalui pemeriksaan administratif terhadap hasil pungutan pajak

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 ayat (21).



dan retribusi daerah secara berkala dan berkeeseimbangan dapat mengantisipasi penyimpanan atau penyelewengan dalam pembuatan laporan.

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat yang di kemukakan oleh Robert Chambers dan Pauline Rose bahwa pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan dan pemantauan proyek infrastruktur. Masyarakat menjadi regulator pada sektor dasar dengan cara mengkritisi berbagai program yang tidak mendukung kemajuan suatu daerah.<sup>59</sup> Bukti lapangan yang menunjukkan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas jaringan internet yang kurang memadai di Kecamatan Tebo Ulu dan kondisi jalan yang menghubungkan Kecamatan Tebo Ulu menuju Kecamatan Rimbo Bujang, mengalami kerusakan. Bagaimana tidak, hal ini akan berimbas kepada kendaraan yang melintas di jalan dan tidak sedikit kendaraan roda dua maupun roda empat yang mengalami kecelakaan di jalan tersebut, hal tersebut menunjukkan DPRD sebagai pengawas kebijakan belum sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap proses pemeliharaan serta pengalokasian anggaran kebijakan Pemerintah Daerah di Kecamatan Tebo Ulu.

<sup>59</sup> Wahyu Suprianto, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Tahun 2012"..., hlm. 46.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang Analisis Perbandingan Infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu: Dari penjelasan mengenai pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu membuktikan bahwa Kecamatan Rimbo Bujang lebih maju dibandingkan Kecamatan Tebo Ulu disebabkan oleh faktor alokasi anggaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tebo Ulu yang tergolong rendah dan alokasi anggaran yang setiap tahunnya tidak sama. Faktor mobilitas Kecamatan Rimbo Bujang yang tinggi, jumlah penduduk Kecamatan Rimbo Bujang yang 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan Kecamatan Tebo Ulu, dan banyaknya masyarakat pendatang di Kecamatan Rimbo Bujang, serta rendahnya tingkat pemeliharaan pembangunan di Kecamatan Tebo Ulu menjadi salah satu penyebab pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang lebih maju di bandingkan Kecamatan Tebo Ulu.
2. Perbandingan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu adalah : Kecamatan Rimbo Bujang memiliki fasilitas yang cukup memadai dan lebih maju dalam pembangunan infrasruktur persediaan energi (kelistrikan), persediaan gedung publik, ketersediaan air

bersih dibandingkan Kecamatan Tebo Ulu dikarenakan mobilitas dan jumlah penduduk Kecamatan Rimbo Bujang yang tinggi sehingga mempengaruhi laju pembangunan infrastruktur dan memiliki fasilitas-fasilitas pembangunan yang baik. Sedangkan Tebo Ulu memiliki fasilitas yang kurang lengkap namun pada pembangunan infrastruktur transportasi Kecamatan Tebo Ulu lebih maju dibandingkan Kecamatan Rimbo Bujang namun tingkat pemeliharannya masih kurang yang membuat pembangunan infrastrukturnya cepat rusak dan jumlah penduduk yang rendah mempengaruhi laju pembangunan infrastruktur menjadi lebih lambat.

3. Kebijakan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu adalah : Kebijakan pembangunan infrastruktur harus memprioritaskan akses terhadap masyarakat serta mempertimbangkan potensi dan jumlah penduduk dari kedua kecamatan tersebut yang akan dimusyawarahkan melalui Musrenbang dan pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu diketahui bahwa pencapaian target program pembangunan infrastruktur di kedua kecamatan tersebut pada umumnya sudah mencapai target yang ditentukan dan direncanakan namun dalam pemeliharaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tebo Ulu masih terbilang rendah karena jumlah penduduk di Kecamatan Tebo Ulu yang jauh lebih sedikit dan alokasi anggaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tebo Ulu yang tergolong rendah dibandingkan Kecamatan Rimbo Bujang dan dapat dilihat DPRD sebagai pengawas kebijakan belum sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap

proses pemeliharaan serta pengalokasian anggaran kebijakan Pemerintah Daerah. Maka sangat diperlukan keterlibatan pemangku kebijakan dengan masyarakat serta pihak swasta dalam pengawasan, pemantauan, dan pemeliharaan pembangunan infrastruktur sehingga terjalin hubungan sosial, kepercayaan serta kerjasama antara ketiganya.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah hendaknya lebih mengupayakan peningkatan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan terutama di Kecamatan Tebo Ulu serta meningkatkan upaya pemeliharaan infrastruktur dan memberi himbauan kepada masyarakat agar ikut andil dalam pemeliharaan infrastruktur di Kecamatan Tebo Ulu serta lebih berkontribusi melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu.
2. Pemerintah Daerah hendaknya bekerjasama dengan berbagai pihak pemerintah maupun pihak swasta dalam meningkatkan fasilitas pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Khususnya pada Kecamatan Tebo Ulu serta berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, sebab semakin besar anggaran yang di dapat maka akan makin banyak pembangunan infrastruktur yang dapat di bangun.
3. Pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu sebaiknya lebih dikoordinasikan dengan masyarakat sekaligus



sebagai *check and balances*. serta DPRD harus lebih konsen dan tidak ada tebang pilih untuk melakukan pengawasan kebijakan, proses alokasi anggaran, serta pelaksanaan pembangunan daerah.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual. *Jurnal Teknologi dan Open Source*. Vol. 3 No. 1, Juni 2020.
- Armansyah, Yudi, (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial Fakultas Syariah UIN STS Jambi*, Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Harrison, Lisa, *Metodologi Penelitian Politik*, Terj. Tri Wibowo B. S, Jakarta: Kencana, 2007.
- Mahmi, Kabul, Ali dan Trigunarso, Indra, Tri, Sri, "Perencanaan Pembangunan Daerah", Cetakan Pertama, Kebayoran: Kencana 2017.
- Murba, "Infrastruktur di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone", Skripsi Uin Alauddin Makasar, 2017.
- Norman, Muh Dr. Amin Jamal, M.Si dan Budiman, S.IP.,M.Si, "Perbandingan Pembangunan Desa Karya Jaya dan Pembangunan Desa Tani Bakti di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara", Skripsi Universitas Mulawarman, 2017.
- Nurman, "Strategi Pembangunan Daerah", Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rosita, Tita dan Rukanda, Nandang, *Studi Komparatif Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat*, Cimahi: Ikif Siliwangi, 2020.
- S. Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Salim, Agus, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Siagan, P. Sondang, *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke 21, (Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suswita, Intan, Damanik, Darwin, Panjaitan, Pawan, Darasa, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 2 No. 1 2020.
- Suprianto, Wahyu, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Tahun 2012", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Syumanjaya, Rahnat, Taringan, Devi, Sry, *Jurnal "Analisis Pengaruh Kualitas Infrastruktur jalan terhadap harga-harga hasil pertanian di Kecamatan dolok silau"*. Diakses pada Rabu 28 September 2022.



## B. Lain-lain

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, “Teori dan Indikator Pembangunan”, (*Admin Bappeda*, 16 Februari 2017).

<https://bappeda.bulelengkap.go.id/informasi/detail/artikel/teori-danindikator-pembangunan-12>, diakses Kamis, 01 Desember 2022.

Badan Pusat Statistik, Kabupaten Tebo Dalam angka Tahun 2022.

[Http://tebokab.go.id/page/kehutanan.html](http://tebokab.go.id/page/kehutanan.html), diakses Minggu, 04 Desember 2022.

<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jai2>, diakses Minggu, 04 Desember 2022.

<https://sidakpost.id/23/04/2018/sejarah-rimbo-bujang-diantara-dua-kawedanan/>, diakses Kamis, 24 Agustus 2023.

Kementerian Republik Indonesia,

[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita\\_media/baca/11744/Pembangunan-infrastruktur-dan-peningkatan-kapabilitas](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/11744/Pembangunan-infrastruktur-dan-peningkatan-kapabilitas). Diakses, 23 Agustus 2023.

[Http://www.radarplanologi.com/2015/11/infrastruktur-dalam-pembangunan-ekonomi-indonesia.html](http://www.radarplanologi.com/2015/11/infrastruktur-dalam-pembangunan-ekonomi-indonesia.html), diakses, rabu 28 September 2022.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-infrastruktur/>, diakses Kamis, 24 Agustus 2023.

Kantor Bappeda Kabupaten Tebo, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Gambaran Umum Kondisi Daerah 2022*.

Kantor Bappeda Kabupaten Tebo, *Kecamatan Tebo Ulu Dalam Angka Tahun 2018-2022*.

Kantor Bappeda Kabupaten Tebo, *Kecamatan Rimbo Bujang Dalam Angka Tahun 2018-2022*.

Kantor Bappeda Kabupaten Tebo, *Rencana Strategis Bappeda Kabaputen Tebo 2022*.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2021.

Sejarah Kabupaten Tebo, Muaro Tebo di Masa Orde Baru, hlm. 92.

Surat Perjanjian Swakelola Nomor : 01/KONT/RHB-JLN/PUPR/2020.

Wawancara dengan Bapak Septiansyah, selaku Kabid Prasarana dan Sarana Wilayah, 22 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak Eko Nuryanto, S.STP, selaku Kabid Perencanaan, Evaluasi dan Litbang, 22 Mei 2023.

Wawancara dengan Uvi, Pekerja Honorer Kecamatan Tebo Ulu, 27 September 2022

Wawancara dengan Ibu Maryati, penjual gorengan selaku masyarakat Kecamatan Rimbo Bujang, 19 Mei 2023.

## C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 ayat (21).

## SURAT RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-2350 /D.II.1/PP.00.11/4/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 04 April 2023

Kepada Yth.  
Kepala BAPPEDA  
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Schubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : Widia Astuti  
NIM : 105190281  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Lokasi Penelitian : Kantor BAPPEDA Kabupaten Tebo Provinsi Jambi  
Waktu Penelitian : 04 April 2023 – 04 Juli 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu ataikum Wr. Wb*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
  
Agus Sahim, M.A., M.I.R., Ph.D  
NIP. 19730817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

## DAFTAR INFORMAN

NO	Nama Informan	Jabatan/Pekerjaan
1	Septiansyah	Kabid Prasarana dan Sarana
2	Eko Nuryanto, S.STP	Kabid Perencanaan, Evaluasi, dan Litbang
3	Uvi Otovia	Pekerja Honorer / masyarakat Kecamatan Tebo Ulu
4	Maryati	Pedagang/ masyarakat Kecamatan Rimbo Bujang

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sunthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA  
UTARA  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
  - Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## Instrument Wawancara

- a. Bagaimana proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu?
- b. Bagaimana alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu?
- c. Bagaimana dampak pembangunan infrastruktur terhadap masyarakat sekitar?
- d. Apakah ada tantangan yang dihadapi selama proses pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu?
- e. Bagaimana kebijakan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Tebo Ulu?
- f. Mengapa pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang lebih maju dibandingkan Kecamatan Tebo Ulu?
- g. Faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tebo Ulu relatif tertinggal dari Kecamatan Rimbo Bujang?
- h. Bagaimana perbandingan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu?
- i. Bagaimana infrastruktur ini diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah?
- j. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu?
- k. Apa rencana jangka panjang untuk pengembangan infrastuktur di Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Tebo Ulu?



## LAMPIRAN



Gambar 4.3 Wawancara dengan Bapak Septiansyah selaku Kabid Prasarana dan Sarana Wilayah.



Gambar 4.4 Wawancara dengan Bapak Eko Nuryanto S.STP selaku Kabid Perencanaan, Evaluasi, dan Litbang.



Gambar 4.5 Wawancara dengan Ibu Maryati Penjual Gorengan selaku masyarakat Kec. Rimbo Bujang.



Gambar 4.6 wawancara dengan Ibu Uvi Pekerja Honorer selaku masyarakat Tebo Ulu

## CURRICULUME VITAE



### A. Identitas Diri

Nama : Widia Astuti

Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Genting, 25 Mei 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Padang Lamo RT 10 Desa Rantau Langkap  
Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo

Agama : Islam

Email : [astutiwidia849@gmail.com](mailto:astutiwidia849@gmail.com)

No Telp/Hp : 082298458737

### B. Riwayat Pendidikan

SDN 110/VIII Tebo : 2006 – 2012

SMPN 8 Tebo : 2012 – 2016

SMKN 7 Tebo : 2016 – 2019

### C. Pengalaman Organisasi

Anggota Osis SMKN 7 Tebo

Anggota Remaja Masjid Desa Rantau Langkap Dusun Tanah Genting

Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi